

Merajut Pengetahuan dan Pembelajaran Bersama Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan

*"Cerita dan Catatan Lapangan Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor
Sumber Daya Alam Bersama Masyarakat di Bentang Alam Kerinci-Seblat"*

2018

Perkumpulan Walestra



© Kawasan Hutan Adak Wong Sesi Elosa Pengasi Bumi Kaki Kerinci (by-Lisa, 16)

ISBN 978-602-2440-3-6



9 786025 184000

Perkumpulan Walestra



Merajut Pengetahuan dan Pembelajaran Bersama Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan

“Cerita dan Catatan Lapangan Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Sumber Daya Alam
Bersama Masyarakat di Bentang Alam Kerinci-Seblat”

Jhoni Imron

Merajut Pengetahuan dan Pembelajaran Bersama
Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan “*Cerita dan
Catatan Lapangan Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Sumber
Daya Alam Bersama Masyarakat di Bentang Alam Kerinci-Seblat*”

Penulis :

Jhoni Imron

ISBN : 978-602-51840-0-0

Editor :

Desri Erwin

Mira

Layout & Desain Sampul :

Jefri Nurrahman

Penerbit :

Perkumpulan Walestra

Redaksi

Jl. Kaca Piring II No. 55 RT 21

Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura, Jambi (36125)

office@walestra.or.id

www.walestra.or.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perkumpulan Walestra



Support by :



“Ketika pohon terakhir ditebang, Ketika sungai terakhir dikosongkan, Ketika ikan terakhir ditangkap, Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.” (*Eric Weiner*)

Sambutan Direktur Eksekutif Walestra

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan kesempatan bagi kami seluruh Tim Konsorsium Perkumpulan Walestra untuk dapat belajar dari masyarakat di Bentang Alam Kerinci Seblat, terkhusus di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Inisiatif memperluas dan memperkuat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), merupakan upaya strategis yang harus dilakukan. Selain dapat melindungi akses dan hak-hak tenurial masyarakat adat dan lokal di dalam pengelolaan sumber daya hutan serta dapat berkontribusi memberikan dampak positif baik secara ekologi, sosial ekonomi. Inisiatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) juga dapat berkontribusi mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dari sector kehutanan dalam mendukung pencapaian komitmen pemerintahan Republik Indonesia dalam merealisasikan pembangunan renda emisi.

Terima kasih disampaikan kepada Penulis yang telah membantu merangkum hasil pembelajaran dari lapangan upaya mendorong pengelolaan hutan bersama masyarakat di Bentang Alam Kerinci Seblat. Terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah ikut membantu kelancaran kegiatan program Walestra di Bentang Alam Kerinci Seblat, antara lain : Pemerintah Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Pemerintahan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Solok Selatan, KPHP Model I Kerinci, KPHP Model VII Hulu Sarolangun, KPHL Hulu DAS Batanghari, Fauna & Flora International – Indonesia Program

(FFI) Merangin Project, Pemerintahan Desa dan Wali Nagari di Lokasi Program, Seluruh KPHA/LPHN di Lokasi Program, dan Seluruh Masyarakat di Lokasi Program.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) atas dukungan pendanaannya sehingga buku ini bisa disusun serta dapat dipublikasikan.

Besar harapan, Semoga buku ini dapat menularkan dan membangkitkan semangat untuk terus mendukung perlindungan serta keberlanjutan akses dan hak-hak tenurial masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumberdaya hutan di manapun berada.

Jambi, Maret 2018

Jabat Erat,

Riko Kurniawan
Direktur Eksekutif Walestra Jambi
/Penanggung Jawab Konsorsium

Sambutan Program Manager Perkumpulan Walestra

Bekerja bersama masyarakat pada bentang alam Kerinci Seblat dengan skema Hutan Adat merupakan *Core Activity* Perkumpulan Walestra sejak 2015, setelah berhasil mendorong pengakuan ruang kelola masyarakat adat di empat desa (Desa Temenggung, Desa Panca Karya, Desa Muaro Pemuat dan Desa Raden Anom) di Kabupaten Sarolangun. Replikasi kegiatan sejenis dipandang relevan untuk diimplementasikan di tempat lain. Pengelolaan hutan secara kolektif yang diikat dengan norma adat dirasakan dapat menjadi jaminan keberlanjutan dan kelestarian hutan itu sendiri. Di sisi lain, skema pengelolaan hutan oleh masyarakat yang ditawarkan Negara seperti yang tertuang dalam peraturan menteri dengan nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (PS) merupakan semangat baru dalam regulasi kehutanan di Indonesia, dengan semangat itu Negara telah menjamin dan mengakui hak – hak komunal untuk menentukan skema yang tepat untuk mereka kelola.

Buku kecil ini merupakan narasi lapangan yang dipetik penulis dari kegiatan yang didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di tiga kabupaten dua provinsi yang menjadi lokasi dampingan Konsorsium Perkumpulan Walestra. Akhirnya semoga buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan diskusi dalam upaya mendorong pengelolaan sumberdaya alam bersama masyarakat khususnya sumberdaya hutan.

Terima Kasih.

Jefri Nurrahman

Daftar Isi

Sambutan Direktur Eksekutif Walestra	v
Sambutan Program Manager Perkumpulan Walestra	vii
1. Mimpi Bersama Perhutanan Sosial.....	1
2. Komitmen Adat Menjaga Hutan Tersisa.....	3
3. Kata Sepakat untuk Satu Hutan Adat	14
4. Menjaga Harmoni Hutan Nagari.....	22
5. Pemberdayaan, Memberdayakan, dan Berdaya Bersama.....	26
6. Parbokalo Bungkan Yang Empat	31
7. Jalan Berliku Menuju Penetapan Hutan Adat.....	40
8. Menunggu Itu Memang Berat, Tapi Mereka Kuat.....	45
9. Pengawasan Lebih Terkontrol dengan SMART <i>Patrol</i> ..	53
10. Patroli Pengamanan Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat.....	61
11. Melukis Alam, Memupuk Rasa Cinta Lingkungan Sejak Dini	65
12. Merawat Semangat Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Masyarakat.....	69
13. Kisah Pendampingan Fauzi: Sakit oleh Pembibitan, Tertawa karena ‘Kacang Tojin’	83
14. UMKM Kacang Tujin.....	87
15. Faktor X (Gagal) Perhutanan Sosial	91
Glosarium	95
Tim Konsorsium Proyek ICCTF Perkumpulan Walestra.....	98
Tentang Penulis.....	100



Gambar 1 Perkampungan di lokasi dampingan Konsorsium Perkumpulan Walestra di Kerinci, Jambi

Mimpi Bersama Perhutanan Sosial

“Terkadang, ambisi pembangunan jauh lebih menonjol meski harus dalam tanda kutip “merusak lingkungan”, ketimbang aksi menyelamatkan lingkungan,..”

Utopis kah program perhutanan sosial sehingga untuk mewujudkannya disebut mimpi bersama? Pada kenyataannya, bisa iya, bisa pula tidak. Namun menyebutkan upaya mitigasi perubahan iklim dengan cara mempertahankan bahkan menambah luasan tutupan hutan itu mimpi bersama cukup masuk akal, di tengah sulitnya kita, bangsa ini, atau bahkan warga dunia ini, bersinergi dalam upaya penyelamatan bumi.

Terkadang, ambisi pembangunan jauh lebih menonjol meski **harus dalam tanda kutip “merusak lingkungan”**, ketimbang aksi menyelamatkan lingkungan (bumi), mengupayakan kelangsungan dunia beserta isinya dengan wajah yang lebih asri dan sejuk.

Namun, manusia tidak selamanya menuruti “nafsu merusak” seperti disebutkan di awal. Nun jauh di pelosok desa, masyarakat yang hidup di daerah-daerah sekitar hutan dan kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, masih memegang teguh adat dan nilai yang berlaku di desanya, membantu melestarikan alam, menjaga hutan, dan memiliki semangat merehabilitasi lahan-lahan yang terlanjur gundul.

Menyebutnya mimpi bersama, selain karena untuk mewujudkan perhutanan sosial harus melibatkan semua pihak, kondisi hutan yang hijau, udara yang segar, dan masyarakatnya yang sejahtera, adalah mimpi semua orang.



Gambar 2 Vegetasi Hutan Adat Biangsari Desa Pengasi Baru Kec.Bukit Kerman Kab.Kerinci

Komitmen Adat Menjaga Hutan Tersisa

“Apobilo ado yang melanggar, kalau segi adat, itu ado terhutang seekor kambing. Kemudian keluar dari adat, yaitu apo pun kerjo dio, nak ngawinkan anak, baralek dio, sedekah, masyarakat tidak mau datang,”

Rerimbunan pohon menghijau terhampar sejauh mata memandang. Pucuk-pucuk kayu terlihat seperti membentuk gelombang, mengikuti lembah dan bukit.

Dari kejauhan, pohon-pohon berbagai jenis dan ukuran tampak tumbuh tinggi menjulang. Sese kali, terlihat satu dua dahan kayu itu bergoyang. Kadang pelan. Seketika kencang.

Suara Siamang (*Symphalangus syndactylus*) terdengar semakin keras memanggil dari dalam rerimbunan pohon. Kicauan burung bersahut-sahutan, merdu, memperdengarkan keserasian irama yang memukau. Sebuah pertunjukan alam tersaji begitu saja. Memang betul-betul satu paket kemewahan yang tak bisa diganti dengan mata uang mana pun.

Di sebuah bukit kecil, sekitar dua kilometer dari deretan pepohonan tersebut, empat orang tengah asyik bercakap-cakap sembari memandang takjub ke hamparan perbukitan di depan mereka. Bukit Kebut, Bukit Sigi, dan bukit-bukit lainnya dengan berbagai nama.

Perbukitan yang masih terjaga itu masuk areal Hutan Adat Biang sari Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman, Kerinci. Dari hutan adat ini, mengalir mata air yang mengairi sawah dan menjadi sumber air yang sangat bermanfaat bagi **masyarakat. Mereka menyebutnya “Batang Ayik Selai”** (nama sungai: Batang air Selai. Selai= satu-satunya).



Gambar 3 Sawah yang dialiri air yang bersumber dari dalam hutan

“Jalan di balik bukit yang itu bisa tembus ke Air Liki (salah satu desa di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Per),” ujar Sujardi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Biang Sari, menunjuk ke arah kiri hamparan perbukitan Hutan Adat Biang Sari.

Jalan itu sudah digunakan sejak zaman Belanda (zaman masuknya orang-orang Belanda ke daerah ini). Setahun terakhir, jalan yang melewati bukit bekas kebun nenas orang tua dulu itu, masih digunakan.

“Seminggu sebelum lebaran, orang-orang dari Air Liki datang ke sini dan menginap di Pengasi Baru sampai beberapa malam,” terang Sujardi.

Tiga orang yang diajaknya bicara, mengangguk pertanda paham.

Sujardi sudah biasa masuk - keluar hutan yang sejak tadi dilihat empat orang itu dari ladang Pak Lanzim. Sebagai Ketua KPHA dan Nenek Mamak di Desa Pengasi Baru, Sujardi adalah orang penting dalam penjagaan dan pengawasan Hutan Adat Biang Sari.

Setiap bulan, dia akan berpatroli bersama beberapa anggotanya, mengitari hutan adat.

“Kalau kini kito nyisir tepi (pinggir hutan, *pen*), yang berikutnya kita masuk ke dalam hutan,” kata Sujardi menjelaskan bagaimana skema patroli yang dilakukan kelompoknya.

Selain patroli rutin yang dilakukan satu kali dalam sebulan, anggota KPHA yang diketuai Sujardi, di waktu-waktu tertentu juga masuk ke kawasan hutan. Mereka mengecek langsung kondisi Hutan Adat Biang Sari, jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan.

“Kalau ado bunyi *sinso* (*Chain Saw*), kalau ado orang *mikat* burung di hutan, kami langsung cek ke lokasi,” kata Sujardi.

Sebagai Nenek Mamak di Pengasi Baru, Sujardi harus siaga 24 Jam untuk menjaga hutan adat. Bahkan, dia dan anggota kelompoknya pernah melakukan patroli ke dalam Hutan Adat Biang Sari sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dan baru turun saat pagi.

Itu terjadi ketika mereka melihat ada titik merah muncul di dalam hutan. Waktu itu, titik merah yang terlihat dari kejauhan tersebut, perlahan mulai membesar. Orang-orang mencurigai keberadaan titik yang berwarna merah menyala.

Setelah berada cukup dekat dengan sumber yang jadi kecurigaan warga, baru diketahui ternyata yang tadi terlihat seperti titik adalah api. Anggota patroli hutan adat tersebut bergotong-royong melenyapkan yang tadi terlihat sebagai titik. Mereka berhasil memadamkan api sebelum kian membesar.

Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang salah seorang yang masuk ke hutan. Api tersulut setelah menyentuh dedaunan dan ranting kering yang banyak terdapat di pangkal pokok kayu.

**


Di Hutan Adat Biang Sari kayunya besar-besar. Diameternya diperkirakan dua sampai tiga lingkaran tangan orang dewasa. Bahkan, ada yang pangkalnya mencapai empat kali lingkaran tangan orang dewasa.

Yang paling besar, warga setempat menyebut nama kayu tersebut **“Banio”**. Kayu jenis ini paling mahal harganya di Kerinci. Biasa digunakan orang untuk membuat rumah atau bahan bangunan.

Selain Banio atau meranti merah (*Shorea leprosula*), juga ada Damar Sigi (*Agathis dammara*), Pinus (*Pinus merkusii Jungh*), dan berbagai jenis kayu lainnya.



Gambar 4 Pohon Kayu Sigi (*Agathis dammara*)



Bagi masyarakat, mempertahankan hutan, bukan sekedar mempertahankan peninggalan nenek moyang. Mereka cukup paham, hutan sudah menyediakan sumber air yang penting bagi kehidupan warga sekitarnya.

Dari penuturan tokoh masyarakat, zaman dulu pernah terjadi hutan di daerah Pengasi Baru hampir gundul akibat perambahan. Itu terjadi sekitar tahun 50-an. Namun ada pula yang menyebut perambahan besar-besaran terjadi pada kurun tahun 80-an. Tapi yang pasti, akibat kejadian ini, sawah-sawah kekurangan air dan kering.

Seperti berguru pada pengalaman, setelah itu orang-orang sudah mulai memikirkan agar hutan tetap terjaga. Hasilnya, seperti sekarang: kayu-kayu berbagai jenis tetap terpelihara hingga berdiameter sangat besar.

**

“Orang adat” (Depati, Ninek mamak. *Pen*) kemudian semakin memperketat penjagaan hutan, terutama yang berada di kawasan tanah ulayat.

Jika hutan adat dirambah dan dirusak, maka pada Kenduri Sko tahun berikutnya orang-orang adat pasti diganti. Demikian tegasnya masyarakat adat di Pengasi Baru menjaga tanah ulayat mereka. Tanah ulayat atau hutan adat itu, saat ini tengah diusulkan mendapatkan legalitas dari pemerintah menjadi Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman.

“Jadi, adat sangat kuat menjaga keberadaan hutan tersebut,” kata Syamsudin, Ketua Lembaga Adat Desa Pengasi Baru, medio Februari 2018.

“Kalau hutan rusak, berarti Depati - Nenek Mamak tidak becus,” ujar Syamsudin, disertai tawa.

Tim dari Walestra mengunjungi Syamsudin di rumahnya, sebelum besoknya meninjau Hutan Adat Biang Sari. Ketua Lembaga Adat Desa Pengasi Baru ini bercerita banyak soal adat dan bagaimana masyarakat menjaga hutan di desanya.

Tangan kanannya mengaduk kopi tubruk yang tersaji di dalam gelas. Pertemuan sendok dan gelas kopi mengeluarkan suara khas beraturan. Suara lentingan sendok menjadi serupa musik ilustrasi dari cerita yang ia tuturkan ke tamunya dari Walestra.

Obrolan dua orang dari Walestra bersama seorang Depati dan Ketua Lembaga Adat Pengasi Baru malam itu, berlanjut makin serius. Pembicaraan mulai fokus ke tema hutan adat dan semangat warga menjaga hutan.

Soal menjaga hutan ini, sudah diatur dalam adat. Dulu undang-undang adat namanya. **“Undang-undang adat itu juga diperkuat dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah desa. Jadi Sejalan,”** kata Syamsudin.

“Apobilo ado yang melanggar, kalau segi adat, itu ado terhutang seekor kambing. Kemudian keluar dari adat, yaitu apo pun kerjo dio, nak ngawinkan anak, baralek dio, sedekah, masyarakat tidak mau datang,” jelas Syamsudin lagi.

Sanksi “keluar dari adat” inilah yang paling menjadi ketakutan masyarakat setempat. Karena setiap apa pun yang menjadi hajat orang-orang yang tinggal di sini, selalu berkaitan erat dengan adat. Memakai aturan adat yang sangat kental.

Semua persoalan masyarakat di dalam desa, lebih banyak diselesaikan secara adat. Jika ada pelanggaran, jika

berdasarkan adat, otomatis ada sanksi dan ada pula denda. Penerapan sanksi dan denda adat, disebutkan Syamsudin, keuntungannya didapat oleh masyarakat secara bersama-sama.

Dalam menjaga hutan, selain takut akan sanksi dan denda adat, masyarakat juga sudah mengerti manfaat dari lestarnya hutan di daerah mereka.

“Pertamo kali sumber air. Nak besawah biso. Desa lain sempat kering, kito tidak kering,” ujar Syamsudin.

Dia menuturkan, sejak hutan terjaga dengan baik jika musim kemarau di daerah ini tidak pernah kekeringan atau kurang air. **Begitu pula musim hujan, tidak pernah terjadi banjir. “Karena hutan *ilok*,” sebutnya.**

Hutan di tanah ulayat Desa Pengasi Baru, kata Syamsudin, mulai benar-benar dijaga nenek moyang mereka sejak tahun 1958. Sebelum itu memang banyak aktivitas penebangan kayu secara ilegal. Pohon-pohon dipanen serampangan.

Setelah diatur adat, pohon tetap boleh ditebang, tapi ada syarat yang harus diikuti dan dipenuhi. Misalnya dalam menebang pohon, warga yang mengambil satu pohon dari hutan wajib menggantinya dengan menanam bibit pohon sebanyak 20 batang. Umumnya diganti dengan penanaman bibit Surian, karena bibit kayu jenis ini lebih mudah didapat.

Selain penggantian tanaman, dalam menebang pohon tidak semua kayu boleh ditebang, dan tidak bisa dipilih sembarangan oleh warga yang hendak mengambilnya. *Dak basing*. Orang adat yang menunjuk mana pohon yang boleh ditebang.

“Di sini pilih satu, jarak lagi di sano pilih pulo satu,” tutur Syamsudin.

Lalu, adat juga mengatur, tidak semua orang boleh mengambil kayu dari hutan adat. Yang memanfaatkan hasil tanah ulayat tersebut harus asli orang Desa Pengasi Baru. *Anak jantan anak batino* asli desa ini. Dan kayu hanya boleh diambil untuk kebutuhan membuat rumah, tidak boleh untuk dijual. Membangun rumahnya pun harus dalam Desa Pengasi Baru, tidak boleh kayu ditebang kemudian dibawa ke luar desa.

Dengan aturan adat seperti ini, dan dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat, hingga kini kayu-kayu yang tumbuh di kawasan Hutan Adat Biang Sari tetap terjaga dengan baik. Karena di desa ini, paling banyak hanya dua atau tiga rumah baru yang dibangun per tahunnya, yang memanfaatkan bahan bangunan berupa kayu dari hutan adat.

**

Dengan kuatnya komitmen masyarakat adat Biang Sari dalam menjaga hutan, mereka juga sudah mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Dana imbal jasa lingkungan sudah mereka terima sebagai penghargaan atas upaya mereka menjaga kayu-kayu di hutan adat yang berkontribusi terhadap tambahan cadangan karbon.

Dana imbal jasa lingkungan diterima Masyarakat Adat Desa Pengasi Baru berkisar 50 juta rupiah per tahun. Uang sejumlah itu, menurut Ketua Lembaga Adat Desa Pengasi Baru, akan digunakan untuk membangun usaha bersama warga, untuk meningkatkan perekonomian dan membantu meringankan beban masyarakat desa. Usaha yang dibangun juga akan disesuaikan dengan potensi yang bisa dimanfaatkan dari hutan adat.

Hutan adat Desa Biang Sari memang sudah sengaja dicadangkan untuk ditinggalkan dan dirawat bersama. Sementara untuk zona berladang, sudah disediakan tersendiri di luar areal hutan adat.

Hutan adat ini disebutkan Depati Parbo, Zuber, dalam Seloko Adat yang *“ulayatnyo di dalam parit yang bersuku empat, lawang berkato duo, di tanah yang sepingkah di bawah payung yang sekaki. Ulayat itu diatur ke atas bebungo kayu, ke bawah bebungo pasir”*. Diatur oleh adat.

Demikian kuatnya adat di Desa Pengasi Baru mengatur penjagaan tanah ulayat yang saat ini berbentuk hutan adat. Untuk mempermudah penjagaan hutan adat tersebut, KPHA Biang Sari, warga, bersama perkumpulan Walestra membangun pos patroli di dalam hutan di Bukit Kebut. Pos itu dibuat akhir 2016.

“Semenjak Walestra masuk ke desa kami, penjagaan hutan adat semakin mantap,” ujar Syamsudin mantap.

* *

Malam sudah semakin larut. Jarum jam menunjukkan angka 10. Fauzi dari Walestra segera menyudahi pembicaraan dengan Ketua Lembaga Adat Desa Pengasi Baru, Syamsudin, dan Depati Parbo, Zuber, malam itu.

Bersama seorang kawan, dia lalu berpamitan kepada lawan bicaranya—Depati Parbo dan Ketua Lembaga Adat Pengasi Baru. Mereka akan melanjutkan bersilaturahmi ke rumah Ketua KPHA Biang Sari, Sujardi.

Malam ini kedua anak muda dari Walestra itu akan menginap di rumah Ketua KPHA tersebut. Besok paginya mereka akan melanjutkan untuk melihat Hutan Adat Biang Sari dari dekat.



Gambar 5 Lanskap Hutan Adat Biangsari, Desa Pengasi Baru Kec.Bukit Kerman, Kerinci, Jambi

Kata Sepakat untuk Satu Hutan Adat

“Dari awal masyarakat memang sudah mencoba mencari jalan untuk dapat menyelamatkan sisa hutan yang masih ada. Mereka berkeinginan untuk mengelola areal hutan yang telah dibuka tersebut dengan cara merehabilitasinya kembali.”

Perubahan itu dimulai pada Mei sekira dua tahun lalu. Beberapa orang dari Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi berkumpul di Ruang Aula Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Model Kerinci. Selain masyarakat, ada perwakilan dari unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, KPHP Unit 1 Model Kerinci dan NGO (*non government organization*) lokal, yang semuanya menjadi berjumlah 20 orang. Pertemuan ini difasilitasi Konsorsium Perkumpulan Walestra.

Dibahaslah beberapa poin yang tujuannya adalah untuk melakukan penilaian potensi replikasi skema perhutanan sosial di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Membangun kesepakatan bersama untuk skema ini memang perlu dilakukan sejak awal.

Dari pertemuan itu diperoleh kesamaan pemikiran, bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci sangat mendukung setiap kegiatan yang masuk ke kabupaten tersebut.

Pihak Dinas berharap, rencana perhutanan sosial di daerah itu dapat direalisasikan dengan baik di tingkat masyarakat, khususnya yang berada di sekitar hutan. Program yang akan dilakukan khususnya dalam hal rehabilitasi lahan dipandang penting, karena kondisi lahan kritis semakin bertambah di Kabupaten Kerinci.

Dalam pertemuan itu pula, ada saran dari Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Model Kerinci yang merekomendasikan kepada Perkumpulan Walestra untuk mendampingi wilayah Kedepatian Semerap (5 Desa) untuk diajukan dalam skema perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat.



Gambar 6 Suasana Sosialisasi Kegiatan di Desa Mukai Tinggi

Dari pertemuan itu, didapatkan kesepakatan bahwa pihak fasilitator pendamping dari Walestra akan melakukan rangkaian tindak lanjut dengan menyosialisasikan sejumlah hasil pertemuan pada 26 Mei 2016 tersebut, di tingkat desa.

Sosialisasi di Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi mendapat giliran pertama, yaitu pada Sabtu tanggal 28 Mei 2016 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Pesusunan Adat Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai.

Sehari setelahnya, tanggal 29 Mei 2016, akan dilakukan sosialisasi untuk 5 (lima) desa di Wilayah Kedepatian Semerap yang terdiri dari Desa Semerap, Desa Koto Baru Semerap, Desa Pasar Semerap, Desa Koto Tengah dan Desa Koto patah. Acara sosialisasi akan dilakukan di kediaman Kepala Desa Koto Patah Kecamatan Keliling Danau, pada Minggu pukul 20.00 WIB.

**

Sabtu 28 Mei 2016, 14 orang berkumpul di Rumah Pesusunan Adat Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi. Mereka terdiri dari unsur Perangkat Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi, Ketua Masyarakat Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, BPD Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi, Tokoh adat serta Tokoh masyarakat. Orang-orang penting di desanya ini, dengan difasilitasi tim dari Perkumpulan Walestra, mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) membahas skema hutan adat.

Pada umumnya masyarakat telah menyadari bahwa hutan sudah semakin habis karena ulah manusia sendiri. Pola berladang dengan cara berpindah-pindah diakui sebagai penyebab berkurangnya tutupan hutan. Cara seperti itu mengakibatkan lahan tidur semakin banyak. Setelah dibuka dan dikelola satu kali, lahan langsung ditinggalkan oleh masyarakat. Permasalahan ini khususnya terjadi di Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi.

Dari awal masyarakat memang sudah mencoba mencari jalan untuk dapat menyelamatkan sisa hutan yang masih ada. Mereka berkeinginan untuk mengelola areal hutan yang telah dibuka tersebut dengan cara merehabilitasinya kembali. Baik dengan cara menanam pohon yang dapat dimanfaatkan hasilnya yakni Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Pinang, Jengkol, Petai dan Jernang maupun tanaman buah-buahan seperti Duku, Durian, Alpukat dan lainnya.

Dalam pertemuan itu, masyarakat berencana akan mencadangkan areal hutan untuk dapat dilindungi. Dan terhadap lahan yang terlanjur diolah akan diatur kembali terkait tanaman yang akan ditanam di lahan tersebut.

Masyarakat Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi, masih di forum FGD itu, meminta bantuan Konsorsium Perkumpulan Walestra untuk dapat memfasilitasi dalam pengajuan perhutanan sosial dengan skema hutan adat ke tingkat Kabupaten atau Provinsi. Sudah lama mereka memimpikan mendapatkan ruang kelola untuk bisa dijaga dari berbagai ancaman dan kerusakan.


Besoknya, Minggu 29 Mei 2016, *Focus Group Discussion* (FGD) di 5 (lima) desa di wilayah Kedepatian Semerap dilaksanakan. Tiga belas orang yang terdiri dari unsur pemerintahan desa dan BPD di wilayah Kedepatian Semerap berkumpul di Rumah Kepala Desa Koto Patah. Sama dengan di desa sebelumnya, FGD ini juga menghasilkan beberapa catatan penting.

Setelah pelaksanaan FGD di dua kelompok masyarakat adat di Kabupaten Kerinci, pekerjaan rumah Perkumpulan Walestra semakin banyak. Tim dari Konsorsium Perkumpulan Walestra harus memilah-milah dan menganalisa kembali hasil-hasil diskusi dengan kelompok masyarakat adat tersebut.

Kerapatan adat dua desa: Mukai Tinggi dan Talang Tinggi, kemudian dipilih sebagai lokasi dampingan berdasarkan beberapa pertimbangan.

**

“Masyarakat yang diwakili para tetua adat berinisiatif mengusulkan untuk didampingi Walestra,” tutur Dodi memulai, ketika saya tanyakan bagaimana inisiatif hutan adat di daerah yang mereka dampingi. Dodi atau lengkapnya Dodi Perwira adalah Koordinator Lapangan program Replikasi Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.



Di depan meja kerjanya, di Kantor Perkumpulan Walestra Jl Kaca Piring II nomor 55 RT 21 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Dodi menceritakan bagaimana inisiasi Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan dan Hutan Nagari Sako Utara Pasir Talang. Nama pertama merupakan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dua yang disebutkan terakhir adalah kawasan hutan yang berada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera barat.

Dodi kembali mengingat-ingat sekira dua tahun lalu. Tepatnya pada awal Februari 2016. Ketika itu dia bertemu Ketua Masyarakat Adat untuk dua desa, Mukai Tinggi dan Talang Tinggi, Idrus Salim. Saat bertemu itulah terjadi obrolan serius antara keduanya seputar upaya penyelamatan hutan dengan skema hutan adat. Dodi, sebagaimana kisah yang diturkannya ulang, menceritakan dampungannya di Pengasi Baru. Masih di daerah Kerinci. Kerinci hilir.

Gayung bersambut. Idrus sangat antusias dengan cerita hutan adat yang disampaikan Dodi. Waktu itu disampaikan Idrus, di daerahnya juga sudah ada pengakuan hutan adat secara *de facto*. Warga desa sudah mencadangkan beberapa luasan hutan penyangga sebagai hutan adat. Areal dengan luasan tertentu yang dilarang untuk dirambah oleh warga.

Area hutan yang merupakan areal penggunaan lain (APL) itu, jika merujuk peta Kabupaten Kerinci, sebelumnya merupakan lokasi ladang berpindah bagi warga sekitar dalam rentang waktu yang cukup lama. Baru sejak beberapa tahun lalu, pola ladang berpindah dan pembukaan lahan baru tidak diperbolehkan lagi dilakukan di area hutan tersebut.

Pembicaraan mereka disudahi dengan janji bertemu dalam pertemuan di Mukai Tinggi pada malamnya.


**

Malam sudah mulai semakin dingin. Sekira pukul 20.00 WIB beberapa tokoh adat yang dipimpin Idrus Salim berkumpul di rumahnya. Mereka menunggu kedatangan penggerak lingkungan dari Walestra, Dodi Perwira.

Tak berselang lama, yang dinanti hadir. Seperti sudah kenal lama, mereka lalu terlibat dalam pembicaraan serius: bagaimana bentuk yang sesuai untuk pengelolaan hutan di wilayah mereka. Dodi memaparkan skema hutan adat yang sudah berjalan di tingkat masyarakat perlu ada pengakuan. Hal yang sama sebenarnya sudah menjadi niatan masyarakat, melalui Ketua Adat Idrus Salim. Ia katakan ingin sekali hutan di daerah itu mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. Bisa lebih terjaga. Juga bisa ditambahkan kerapatan pohonnya dengan jenis tanaman baru.

Para tetua adat meyakini, hutan yang rimbun, hijau, sangat berpengaruh **terhadap ketersediaan air di desa mereka.** “Kalau dulu air tersedia berlimpah. Saat ini, meski bukan musim **kemarau, air yang mengalir di sungai sangat sedikit,”** ujar Idrus, sebagaimana diceritakan Dodi.

Lama juga orang-orang itu terlibat diskusi. Malam itu diputuskanlah, masyarakat yang diwakili Ketua Adat Idrus Salim akan mengirimkan surat kepada Perkumpulan Walestra di Jambi, untuk meminta lembaga advokasi lingkungan itu mendampingi mereka mengajukan legalitas dan mendampingi pengelolaan hutan adat.



“Malam itu, kami diskusi sampai jam satu malam,” ujar Dodi mengenang pertemuan perdana dengan para tetua adat Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi.

Tiga bulan berlalu. Rencana yang dulu pernah diutarakan para tetua adat dan diajukan ke Perkumpulan Walestra, mulai direalisasikan.

* * *



Gambar 7 Hutan Nagari di Solok Selatan

Menjaga Harmoni Hutan Nagari

“Kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukan dengan potensi yang ada, ia hanya harus ahli memainkan bandul agar tercipta suatu keseimbangan. Baru kemudian keseimbangan itu pelan-pelan akan terdengar serupa harmoni. Harmoni di Hutan Nagari.”

Sebelum pertemuan para pihak di Kabupaten Kerinci, tepatnya tanggal 19 Mei 2016, Perkumpulan Walestra juga sudah melakukan *assesment* potensi replikasi skema perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Sebanyak 36 orang yang terdiri dari unsur POKJA Perhutanan Sosial Sumatera Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan, Ketua Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Provinsi Sumatera Barat dan Penyuluh Kehutanan Kabupaten Solok Selatan, berkumpul di Hotel Pesona Alam Sangir, di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan.

Hasilnya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Solok Selatan sangat mendukung sekali dengan adanya PHBM atau Hutan Nagari di wilayah tersebut. Dukungan itu juga dilatarbelakangi oleh kondisi minimnya tenaga Polhut Kabupaten Solok Selatan. Pihak Dishutbun berharap, dengan adanya PHBM, maka cita-cita untuk melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat dapat diupayakan secara maksimal.

Keberadaan PHBM atau Hutan Nagari diharap bisa mejadi peluang bagi masyarakat nagari untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil hutan yang selama ini mungkin dikelola oleh pihak luar (investor). Keberadaan Hutan Nagari bisa memperkuat keberadaan masyarakat nagari. Skema ini juga merupakan bentuk pengakuan terhadap wilayah mereka.

Perkumpulan Walestra cukup berhati-hati. Bagaimanapun, kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik orang per orang, terlebih yang menyangkut orang banyak dan dalam jangka

waktu lama pastilah perlu rencana yang matang. Agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari, pondasi di tingkat tapak (nagari) haruslah kuat. Perlu melibatkan semua elemen di masyarakat. Pengalaman pendampingan di banyak lokasi sebelumnya menjadi acuan. Jika pondasi tidak kokoh, ke depannya akan muncul berbagai masalah yang akan melemahkan kelembagaan yang dibangun.


Ada 10 (sepuluh) nagari yang teridentifikasi memiliki potensi untuk replikasi skema perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan. Tersebutlah nama Hutan Nagari (HN) Padang gantiang yang memiliki luasan \pm 1.524 ha. Kemudian HN Padang Air Dingin, perkiraan luas \pm 2.170 ha. HN Lubuk Gadang Utara \pm 1.401 ha, HN Lubuk Gadang \pm 5.123 ha, HN Lubuk Gadang Selatan \pm 1.000 ha, HN Pakan Rabaa Timur \pm 6.473 ha, HN Pakan Rabaa Utara \pm 1.479 ha, HN Lubuk Ulang Aling \pm 6.652 ha. Para peserta dalam pertemuan juga memasukkan nama HN Sitapus \pm 212 ha dan HN Abai \pm 1.043 Ha.

Total luas hutan nagari yang teridentifikasi dalam pertemuan tersebut \pm 27.077 Ha. Namun, disepakati jika pendampingan hanya akan dipilih 2 nagari yang masyarakatnya serius dan berkomitmen tinggi terhadap hutan nagari.

**

Selasa 31 Mei 2016, *Focus Group Discussion* (FGD) di Nagari Lubuk Gadang Selatan dilaksanakan di Surau (Mushola) Nagari. Ada sekitar 41 (empat puluh satu) orang yang berkumpul di rumah ibadah tersebut. Mereka terdiri dari Penyuluh Kehutanan Kabupaten Solok Selatan, Sekretaris Nagari, BAMUS, Ketua Jorong dan Tokoh Masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan.

Masyarakat ternyata sangat setuju dan sepakat dengan adanya Hutan Nagari. Menyadari kesuksesan dan kelancaran PHBM/Hutan Nagari tidak terlepas dari dukungan dan



dorongan masyarakat, maka direkomendasikanlah dalam forum tersebut untuk dilakukan sosialisasi terkait skema Hutan Nagari ini ke seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat melihat, dengan adanya Hutan Nagari di Lubuk Gadang Selatan, hal itu bisa menjadi magnet tersendiri bagi berbagai kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat seperti *eco-tourism* (ekowisata), dan lain sebagainya. Di Nagari Lubuk Gadang Selatan ada fitur alam Aia Malanca dan Tansi 4 (empat) sebagai objek wisata pemandian dan air terjun.

**

Keberadaan hutan dan fungsi hutan bagi masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan sangat besar artinya. Sebelumnya juga sudah diusulkan Hutan Nagari yang berada di Pasir Putih, namun terkendala saat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi.

Implementasi skema PHBM di daerah Kabupaten Solok Selatan sangat didukung oleh berbagai potensi. Masyarakatnya. Pemerintahnya. Alamnya. Tapi tetap saja, potensi yang ada harus bisa disinergikan dengan baik.

Kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukan dengan potensi yang ada, ia hanya harus ahli memainkan bandul agar tercipta suatu keseimbangan. Baru kemudian keseimbangan itu pelan-pelan akan terdengar serupa harmoni. Harmoni di Hutan Nagari.



Gambar 8 Pengurus KPHA Perbakalo Bungkan Yang Empat Bersama ICCTF

Pemberdayaan, Memberdayakan, dan Berdaya Bersama

“Jefri Nurrahman, Program Manager Perkumpulan Walestra, menggarisbawahi kesimpulannya bahwa skema perhutanan sosial yang dilakukan Perkumpulan Walestra ini adalah sebuah kerja pemberdayaan masyarakat, yang saling memberdayakan untuk bisa berdaya bersama.”

Program Replikasi Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, didanai dari hibah *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dengan co-founding FFI untuk beberapa lokasi.

Tujuan umum dari program yang didanai ICCTF dan dikelola Konsorsium Perkumpulan Walestra (Walestra, CFES dan ICS) ini untuk menyelamatkan bentang alam di Kerinci Seblat melalui skema perhutanan sosial.

“Tujuan umum atau goal dari program ini adalah menyelamatkan bentang alam Kerinci Seblat melalui skema perhutanan sosial sebagai upaya untuk mendukung mitigasi perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK),” ujar Jefri Nurrahman, Program Manager Swakelola ICCTF – Konsorsium Perkumpulan Walestra.

Menurut Jefri, selain untuk ikut serta mempertahankan luas tutupan hutan di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, upaya yang dilakukan pihaknya dengan mendampingi kerapatan adat di beberapa desa adalah untuk membantu masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan ruang kelola hutan di sekitar daerah mereka. Pengusulan legalitas hutan adat di wilayah sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini, lanjut Jefri, sejalan dengan amanat Permen LHK nomor 83 tentang Perhutanan Sosial.

Perkumpulan Walestra menghitung, dengan dipertahankannya tutupan kawasan hutan minimal 7.000 hektar yang dikelola melalui skema PHBM/hutan adat, hal itu berkontribusi terhadap upaya penyelamatan stok karbon 818.720 Ton C, setara 3.739.668,34 Ton CO₂_e.

Skema perhutanan sosial yang dilakukan juga bertujuan agar terehabilitasinya lahan kritis di bentang alam Kerinci Seblat minimal seluas 500 hektar melalui pengembangan tanaman kehidupan dan kehutanan (*agroforestry*) yang berbasis keruangan mikro desa. Sehingga, dalam lima tahun pasca dimulainya kegiatan, dari lahan yang tadinya kritis bisa menyimpan stok karbon minimal 58.445 Ton C per tahun, setara 266.959,30 Ton CO₂ _e per tahun.

Melibatkan masyarakat dalam skema program adalah keniscayaan. Masyarakat, selain objek juga merupakan subjek dari pemberdayaan di lokasi kegiatan. Perkumpulan Walestra menargetkan, kegiatan Replikasi Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam lokal pada 10 kelompok masyarakat di lokasi dampingan.

Selain itu, program ini juga ditujukan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama terkait isu mitigasi perubahan iklim. Tentu jalan yang ditempuh adalah melalui aneka rupa kampanye dan advokasi lingkungan—dalam hal ini pengelolaan hutan berkelanjutan.



Gambar 9 Sign Board KPHA Mukai Tinggi-Talang Tinggi

Perkumpulan Walestra mencatat, beberapa hal yang bisa memengaruhi dalam pencapaian sasaran kegiatan skema perhutanan sosial di wilayah damingannya antara lain: Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam hal mengeluarkan kebijakan yang mendorong pengembangan skema perhutanan sosial sebagai upaya untuk mencegah alih fungsi kawasan hutan untuk peruntukan lain seperti perkebunan besar, HTI, HPH.

Selain itu, sinergisitas keputusan di setiap level instansi pemerintahan mulai dari tingkat desa, kabupaten sampai tingkat pusat juga sangat penting. Dukungan para pihak yang berkepentingan di lokasi kegiatan perhutanan sosial juga sangat berpengaruh, baik dari individu, instansi, komunitas, maupun masyarakat secara luas.

Pengembangan model perhutanan sosial merupakan upaya konservasi oleh masyarakat yang sejatinya perlu didorong oleh

berbagai pihak dari berbagai sektor. Karena secara ekonomi, masyarakat yang desanya berada dekat dengan hutan sangat bergantung dengan potensi sumber daya yang ada di sekitar mereka.

Program yang diimplementasikan dapat memperbesar komitmen para pihak untuk pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai upaya mendukung mitigasi perubahan iklim serta perbaikan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain itu, skema perhutanan sosial akan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana tata ruang daerah yang berkelanjutan, serta dapat mengintervensi laju degradasi dan deforestasi kawasan hutan, secara legal dan terencana.

Jefri Nurrahman, Program Manager Perkumpulan Walestra, menggarisbawahi kesimpulannya bahwa skema perhutanan sosial yang dilakukan Perkumpulan Walestra ini adalah sebuah kerja pemberdayaan masyarakat, yang saling memberdayakan untuk bisa berdaya bersama.



Gambar 10 Air Terjun Renah Tigo Tenggek di Hutan Adat Perbakalo Bungkan Yang Empat, Mukai Tinggi-Talang Tinggi, Kerinci, Jambi

Parbokalo Bungkan Yang Empat

“Zaman orang tua dulu, secara tertulis tidak ada aturan untuk jaga hutan. Tapi hutan atau tanah ulayat itu dijaga oleh Depati, Nenek Mamak. Itu sudah menjadi aturan adat,”

Idrus Salim baru merebahkan badannya di atas pembaringan. Ia hendak beristirahat sehabis menunaikan shalat Isya. Baru sebentar, terdengar suara memanggilnya dari luar rumah.

Rumah yang ditinggali Idrus dibangun dua tingkat, tapi hanya bagian bawah yang lebih banyak digunakan. Dia bersama istri, anak, menantu dan cucunya lebih memilih tinggal di lantai bawah. Idrus bersama istrinya mendiami kamar yang terletak di bagian belakang rumah.

Di lantai atas juga terdapat satu kamar yang ditempati cucu perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah (SMP). Selain itu juga tersedia ruangan yang cukup luas, yang biasa dipakai oleh tamu yang ingin bermalam di rumahnya.

Idrus Salim segera keluar. *Ntino Anang*, istrinya, memberitahukan jika yang datang adalah fasilitator dari Perkumpulan Walestra.

Di luar, dua orang anak muda sudah berdiri di depan pintu utama sejak beberapa menit lalu. Tanpa menunggu lebih lama, keduanya langsung masuk disambut si penghuni rumah seperti anak yang baru pulang merantau. Keduanya terlibat obrolan hangat dengan Idrus Salim.

Idrus terlihat seakan sangat terbiasa berbincang-bincang dengan kedua anak muda di depannya. Suaranya yang *be-tone* berat semakin menambahkan kesan berwibawa pada sosoknya sebagai Ketua Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat.

Puas bertanya kabar masing-masing, perbincangan mereka mulai menjurus ke soal hutan adat.

“Zaman orang tua dulu, secara tertulis tidak ada aturan untuk jaga hutan. Tapi hutan atau tanah ulayat itu dijaga oleh Depati, Nenek Mamak. Itu sudah menjadi aturan adat,” kata Idrus Salim, menjawab pertanyaan dari salah seorang yang datang ke rumahnya malam itu.

Aturan adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, kata Idrus, juga mengatur bagaimana cara menggarap lahan hutan, yang sudah masuk ke dalam tanah ulayat mereka.

“Sudah menjadi pemakaian adat, ada larang pantang dalam pengelolaan hutan. Yang dilarang banyak,” kata dia menjelaskan.

Aturan menanam jenis tanaman, juga diberitahukan ketika **Orang Tua Adat** memberikan ‘Ajun Arah’. **Ajun Arah** adalah semacam penentuan pemilihan lokasi berladang dan jenis tanaman yang harus ditanam di lahan yang sudah dipilih oleh tetua adat seperti Idrus Salim.

Di kerapatan adat yang dipimpin Idrus Salim, sampai saat ini aturan menanam pohon tetap ada dan dipatuhi, namun untuk pembukaan lahan baru tidak dilakukan lagi. Masing-masing orang akan mendapat bagian berdasarkan *Kalbu* dan Sukunya.

Kerapatan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat Desa Talang Tinggi dan Mukai Tinggi terdiri dari empat suku. Empat suku tersebut, yakni Suku Rajo Indah, Suku Rajo Sulah, Suku Rajo Penghulu dan Suku Datuk. Selain itu, rumpun masyarakat adat ini juga terbagi menjadi enam *Kalbu*, yaitu 1) *Kalbu Anak Jantan*, 2) *Kalbu Anak Batino Tuo*, 3) *Kalbu Anak Batino Mudo/Kampung Dalam*, 4) *Kalbu Rajo Penghulu*, 5) *Kalbu Rajo Sulah* dan 6) *Kalbu Datuk*.

Parbokalo Bungkan Yang Empat bisa diartikan kata per kata sebagai purbalaka/zaman dahulu-suku-yang-empat. Defenisi ini berdasarkan penuturan Idrus Salim kepada tim Perkumpulan Walestra.

“Jadi asal usulnya, Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat memiliki empat suku dan enam kalbu itu,” kata Idrus Salim menjelaskan.

*

Di tanah ulayat Parbokalo Bungkan Yang Empat, dulu di lahan yang agak datar memang dikelola menjadi ladang warga. Sementara beberapa lokasi memang sengaja dibiarkan. Wilayah itu, terutama di areal tanah yang memiliki kemiringan yang cukup curam, sampai kini tetap dipertahankan tegakan pohonnya, dan juga ditanami bambu.

“Pada umumnya di Kerinci ini, untuk menjago tanah agar tidak longsor, ditanam bambu. Itu diatur dalam adat,” ujar Idrus Salim.

Bambu, selain untuk mencegah longsor, juga sebagai batas agar tidak sengketa. Selain itu untuk menandai daerah yang tidak boleh digarap.

“Kalau kayu manis, dipanen. Bambu kalau pun dipanen bisa cepat tumbuh lagi,” ujar Idrus, menjelaskan alasan pemilihan bambu sebagai tanaman pembantas di lahan-lahan warga.

Lagi pula, kayu manis menjadi tanaman tua yang utama ditanam di setiap lahan. Kebiasaan ini sudah ada dan berlangsung sejak dulu. Leluhur mereka sudah meninggalkan kebiasaan bertani yang sangat berguna untuk menopang perekonomian warga hingga saat ini.

Memang diakuinya, tidak ada aturan adat yang tertulis mengatur hal itu, namun kebiasaan nenek moyang mereka sejak dulu, itu ada dan tetap dipegang hingga kini.

“Nyo ginei,” kata Depati Intan Tengah Padang, Idrus Salim, dalam logat Kerinci yang kental.

“Kopi diantar oleh Palawija, tanaman tua seperti kulit manis, surian, itu diantar oleh kopi. Kalau dak macam itu dak rutin **orang menyang.**” Idrus Salim menjelaskan kebiasaan nenek moyang mereka dulu, sambil sesekali terlihat sedang berusaha mengingat-ingat.

*

Pandangan Idrus Salim terhenti pada kalender 2018, yang dari tadi dipegang dan diamati istrinya. Kalender itu memuat gambar petani di antara barisan tanaman kopi yang masih *dipolybag*. Kegiatan serupa pernah dilakukan Idrus sejak akhir 2016 lalu. Waktu itu, masyarakat membentuk kelompok pembibitan didampingi Konsorsium Perkumpulan Walestra.

Kelompok-kelompok itu kemudian menyemai bibit di bawah naungan yang telah dibuat secara swadaya, dengan bantuan pendanaan dari ICCTF. Kayu manis, kopi dan surian dipilih sebagai tanaman yang disemai. Pemilihan tanaman ini sendiri merujuk kepada potensi lokal serta apa yang dilakukan dan menjadi kebiasaan warga setempat sejak lama.

Dua orang muda dari Walestra masih asyik mendengar kisah sang Depati. Laki-laki 60-an tahun yang juga dipanggil *Nyantani Anang* itu kembali meneruskan ceritanya.

Soal pembibitan, ia paham betul bagaimana bersemangatnya kelompok yang mereka bentuk waktu itu, memasukkan pohon demi pohon bibit ke dalam plastik kecil berwarna hitam. Yang

menarik dari metode dalam kegiatan pembibitan itu, masing-masing anggota kelompok hanya akan mendapatkan bibit tanaman sebanyak yang disemainya sendiri.



Gambar 11 Pusat Pembibitan Mukai Tinggi - Talang Tinggi

Desember 2016 hingga Januari 2017 masyarakat membuat bibit. Bulan-bulan setelah itu, sampai Agustus, aktivitasnya adalah perawatan. Kayu Manis, Kopi dan Surian, dari lokasi pembibitan itu akan ditanam di ladang warga yang masuk dalam areal hutan adat yang tengah diusulkan untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah.

Sudah sekian bulan berlalu sejak berakhirnya kegiatan pembibitan. Sebanyak 120.000 bibit yang terdiri dari Kayu Manis, Kopi dan Surian, sudah dibagikan ke masing-masing anggota kelompok. Sebagian sudah ditanam, sebagian lainnya masih menunggu musim. Namun Idrus Salim memastikan bahwa bibit yang mereka semai secara swadaya itu akan

sangat berguna untuk memperbaiki kondisi tanah ulayat yang mereka gunakan untuk berladang.

“Kalu bibit, berapa pun di sini pasti habis. Banyak yang mau. Bahkan kalau jual, banyak yang mau beli,” kata Idrus, menjawab pertanyaan dari Mustaem, Fasilitator Desa di Perkumpulan Walestra, soal sebagian bibit yang belum ditanam anggota kelompok.

Masyarakat di daerah itu memang membutuhkan banyak bibit kayu manis. Apalagi, harga komoditi ini semakin membaik.

Idrus memperkuat pernyataannya dengan menyebut jenis tanaman *Cassia vera* ini sebagai tanaman pokok di daerahnya. Tanaman kebiasaan. Bahkan tanaman itu sangat bisa diandalkan untuk memenuhi pundi-pundi keuangan petani. Karena panennya setelah dalam jangka waktu yang lama, maka kayu manis juga dianggap sebagai tabungan keluarga.

“Ini rombongan kami, itu mau pergi umroh, itu 20 orang, dari desa ini,” ujar Idrus.

Menurut dia, petani bisa berangkat ke tanah suci, seperti itu, dari pendapatan menjual hasil panen kayu manis.

“Nengok itu, dari keberhasilan seluruh penduduk di sini, orang sudah terpengaruh (untuk menanam kayu manis. *pen*). Kulit (kayu manis, *pen*) mahal. Kalo sekarang itu Rp 40.000,” ujar *Nyantan Anang* itu menyakinkan.

Contoh yang diberikan Idrus Salim, seolah ingin menegaskan, bahwa bibit yang mereka hasilkan dari kerja kelompok pembibitan tempo hari, tidak akan sia-sia.

**

Mustaem melihat ke jam yang melingkar di tangannya. Jarum pendek menunjuk ke angka 10, jarum panjang tak dihiraukannya mengarah ke mana. Dia lalu memberi isyarat dengan kode gerakan kepala seperti sedang bertanya kepada kawan di sebelahnya.


Yang diberi kode segera paham. Segera saja mereka menyudahi pembicaraan dengan pemilik rumah. Keduanya lalu berpamitan pulang.

Tawaran menginap susul menyusul datang dari *Nyantana* dan *Ntino Anang*. Tapi pekerjaan yang menumpuk, menjadi alasan yang tepat sehingga keduanya bisa berpamitan, tanpa menyinggung perasaan dua laki-bini tersebut.

Di luar titik-titik hujan kian jelas terlihat. Suara butiran air yang jatuh di atas atap rumah terdengar semakin besar. Tapi, pilihan untuk kembali ke dalam rumah bagi dua anak muda dari Walestra itu sudah tidak ada lagi.

Berat rasanya untuk kembali masuk, setelah alasan pamungkas dilontarkan ke pemilik rumah agar mengizinkan mereka tetap pulang ke *basecamp* Walestra di Kota Sungai Penuh. Keduanya langsung menaiki motor lapangan yang terparkir tepat di depan rumah Idrus Salim.

*



Motor dipacu menerobos hujan. Tanpa mantel, keduanya mantap melaju dengan posisi badan dicondongkan ke depan.

Sepanjang perjalanan pulang, sesekali terlihat kilat menyambar memperlihatkan siluet di balik bukit-bukit yang memagari Kota Sungai Penuh. Taem dan kawannya terlihat sesekali tertawa sambil menahan dingin yang semakin menusuk tulang. Entah apa yang mereka bicarakan.

Sepeda motor yang dikendarai Taem tetap melaju menerobos hujan. Kawannya yang membonceng seperti bersembunyi dibalik badan Taem yang tidak terlalu besar. Di kepala keduanya berkecamuk macam-macam pikiran. Sederet daftar pekerjaan masing-masing sudah menunggu untuk segera dituntaskan.



Gambar 12 Pengukuran Diameter Pohon oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat

Jalan Berliku Menuju Penetapan Hutan Adat

“Terkadang instrumen di tingkat lokal belum siap menjalankan peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Menjadi hal ‘wajar’ jika untuk mengurus legalitas satu lokasi hutan adat saja, membutuhkan waktu bertahun-tahun.”

MusTaem terburu-buru memasuki *basecamp* Perkumpulan Walestra di Dusun Bakti Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Rabu (14/02/2018) pagi. Di dalam tas ranselnya, sebundel besar berkas dokumen pengusulan hutan adat dia bawa dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.

“Masih ada yang kurang,” kata Ta’em, sebelum sempat ditanya.

Fauzi yang dari tadi melihat gerak-gerik Ta’em, lantas menanyakan yang disebut kekurangan dalam dokumen pengusulan hutan adat tersebut.

Mereka harus melengkapi beberapa berkas lagi. Padahal, menurut keduanya semua berkas penting sudah dilampirkan ketika awal-awal mengajukan usulan hutan adat.

Dokumen itu ternyata baru diproses setelah sekian lama diajukan.

“Pengajuannya sudah dua tahun lebih,” ujar Fauzi.

“Iya,” jawab Taem membenarkan, sambil menurunkan tas hitam yang sedari tadi menempel di punggungnya.

Taem lalu mengeluarkan dokumen setebal kira-kira 10 centimeter, dibukanya lembar demi lembar. Fauzi yang dari tadi berdiri di belakang Mustaem, terlihat menarik beberapa lembar kertas yang berisi tanda tangan Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dan Ketua Adat, dari dalam lemari arsip yang berada tepat di sampingnya.

“Ini masih ada arsip surat yang dulu,” kata Fauzi.

Mereka lalu kembali menyusun dan memilah-milah dokumen yang tadi dibawa Taem untuk kemudian dijilid kembali.

Untuk beberapa tambahan, Taem harus meminta kembali ke beberapa desa dampingan Perkumpulan Walestra. Yang membuat sulit adalah beberapa desa ternyata tidak terdapat jaringan seluler, sementara tempat berkirim pesan tidak ada. Pilihan satu-satunya, Taem harus berkeliling dari desa ke desa berkejar-kejaran dengan sisa waktu yang tersedia.

**

Mendekati Zuhur terdengar nada dering *smartphone* milik Taem berbunyi beberapa kali. Pemiliknya, sejak beberapa menit lalu membersihkan diri di kamar mandi berukuran kecil yang terdapat di bagian belakang *basecamp*.

Mendengar nada panggilan dari ponsel cerdasnya, Taem bergegas menyudahi aktivitas pribadinya itu. Dia menduga-duga jika yang menelpon adalah Ketua KPHA atau Ketua Adat di beberapa desa yang tadi sempat ia kontak sebelumnya. Ponsel yang dari tadi berdering tak lantas ia ambil. Taem justru mengemas kembali tas ranselnya. Setelah menunaikan Shalat Zuhur, Taem langsung mengenakan kostum lapangan. Ia harus segera melanjutkan mengurus persyaratan penetapan hutan adat yang jadi mimpi masyarakat di beberapa desa di Kerinci.

Dengan terburu-buru Taem ke luar, meninggalkan *basecamp* Walestra.

**

Di Jambi, di kantor Perkumpulan Walestra Jl Kaca Piring II nomor 55 RT 21 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jefri dan Riko terlibat diskusi serius.

Jefri selaku Program Manager Perkumpulan Walestra merasakan ada banyak masalah di lapangan yang justru hadir di masa-masa akhir durasi kegiatan yang dikerjakan Konsorsium Perkumpulan Walestra. Sebagai penanggung jawab

pelaksanaan *project* perhutaan sosial di tiga kabupaten dalam dua provinsi itu, Jefri pantas merasa risau.

Riko, Direktur Eksekutif Perkumpulan Walestra ikut merasa khawatir. Keruwetan proses dalam kegiatan ini bisa saja membuat coreng wajah lembaga yang dia pimpin dan dibangun susah payah. Namun yang lebih dipikirkannya, mengapa sebegitu rumitnya pemerintah mengeluarkan legalitas hak ulayat warganya sendiri. Terhadap kenyataan ini, Riko mengaku sangat heran.

Memang di setiap rapat-rapat rutin dan komunikasi informal bersama tim lapangan sebelumnya, kabar tentang kesulitan-kesulitan tim dalam berhadapan dan berhubungan dengan pemerintah setempat sering terungkap. Bolak-balik dokumen pengusulan itu diusulkan, ditanyakan, dikomunikasikan, dilengkapi, dan akhirnya ternyata masih terdapat kekurangan juga.

Sementara, kata Riko, lembaganya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mendampingi. Menjembatani komunikasi antara masyarakat (adat) dengan pemerintah daerah setempat.

Kata Riko lagi, kesulitan-kesulitan yang muncul juga disebabkan tatkala terdapat ketidaksinkronan antara aturan lama (Putusan MK 35 Tahun 2012) dengan aturan baru (Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016). Antara kebijakan pusat (Pemerintah RI, Kemen LHK) dan daerah (Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci). Selain itu, politik lokal juga berpengaruh besar.

“Kita kesulitan ketika harus menemukan berbagai persoalan baru yang timbul akibat kebijakan itu,” kata Riko.

Namun bukan hanya masalah peraturan dan nuansa politik lokal, sumber daya penyelenggara pemerintahan daerah juga

sangat memengaruhi lancar tidaknya perjalanan program perhutanan sosial yang dilakukan di desa-desa.

Terkadang instrumen di tingkat lokal belum siap menjalankan peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan **pemerintah pusat. Menjadi hal 'wajar' jika untuk mengurus** legalitas satu lokasi hutan adat saja, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena masa-masa selama itu habis hanya berkuat pada menyerahkan, melengkapi, dan menunggu perkembangan diprosesnya dokumen usulan dengan bermacam-macam syarat tambahan.

Riko dan Jefri terus berdiskusi, sambil menyelami peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, dan mencari kemungkinan solusi permasalahan mandeknya proses penetapan/legalitas hutan adat di desa-desa dampungannya dalam skema perhutanan sosial yang dicanangkan pemerintah pusat.

**

Di Kerinci, Mustaem terus mengunjungungi desa-desa dampingan Walestra satu per satu. Ia bertemu dan menyelesaikan urusan berkas pengusulan hutan adat yang sudah masuk *deadline* di *schedule* mereka.

Dari satu desa ke desa lain, Taem berkeliling hampir tak tentu waktu. Perjalanannya melintasi jalan aspal, makadam. Jalan lurus. Berliku. Siang, malam, baginya sama saja.

Mukai Tinggi, Talang Tinggi, beberapa desa di Wilayah Kerapatan Adat Pulau Tengah. Desa Pungut Hilir, Desa Pendung Hilir, Tanjung Genting. Semua didatangi untuk sebuah misi yang—lagi-lagi—teramat penting. **



Gambar 13 Pengurus LPHN Lubuk Gadang Selatan bersama ICCTF di lokasi budi daya lebah madu

Menunggu itu memang Berat, Tapi Mereka Kuat

Mereka tidak tahu, harus menunggu keputusan penetapan Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan sampai kapan. Namun menjaga dan mengelola hutan nagari tetap dilakukan kelompok dengan penuh semangat. Ekowisata dan produk HHBK seperti madu menjadi pengisi waktu menunggu yang mendatangkan banyak manfaat.


Elisman Hia sangat bersyukur, upaya kelompoknya bersama Masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan dalam menjaga hutan di wilayah mereka, mendapat banyak kemudahan. Dengan mata berbinar, lelaki 52 tahun ini terlihat semangat sekali menceritakan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyelamatkan sumber daya alam di kenagariannya itu.

Salah satu upaya untuk dapat dengan leluasa mengelola sumber daya alam dan hutan di Nagari Lubuk Gadang Selatan, adalah dengan mengusulkan skema Perhutanan Sosial: Hutan Nagari. Model pengelolaan yang sedang mereka perjuangkan itu, di samping akan tetap mempertahankan fungsi ekologi kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, juga menawarkan berbagai cara lainnya dalam memberi nilai tambah ekonomi kawasan hutan bagi warga sekitar.

Menurut Elisman, menjaga Hutan Nagari sama halnya menjaga sumber makanan lebih tiga belas ribu jiwa penduduk Lubuk Gadang Selatan. Sumber air bagi sawah-sawah yang dikelola warga berasal dari Hutan Nagari. Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan juga menjadi penyedia atau sumber air yang digunakan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang dialiri ke Jorong-jorong (Dusun-dusun).

Dengan model perhutanan sosial, masyarakat Lubuk Gadang Selatan bisa tetap menjaga hasil hutan kayu (HHK) dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Skema ini juga menyediakan peluang pengembangan ekowisata sebagai sumber pemasukan bagi Nagari dan warga.

Elisman dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) melalui SK Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan.



Dengan posisi itu, ia diberi tanggung jawab untuk mengurus hak pengelolaan Hutan Nagari sesuai regulasi yang berlaku, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Kelompok pengelola hutan ini beruntung sekali. Satu per satu mimpi mereka mulai terwujud. Pengajuan Permohonan Pengelolaan Hutan Nagari telah diverifikasi oleh tim dari KLHK pada 17 November 2017 lalu. Kesamaan niat masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan untuk menjaga hutan di wilayahnya dengan skema yang ditawarkan pemerintah, menjadi semacam doa bersama yang mengiringi pengusulan penetapan hutan nagari ke tingkat pusat. Sekarang, mereka hanya harus lebih banyak ikhtiar dan bersabar.

Elisman masih mengingat dengan jelas bagaimana mimpi masyarakat soal pengelolaan hutan ini mendapat jalan lewat dampingan Konsorsium Perkumpulan Walestra. Dia menuturkan, semua peluang mulai terbuka ketika konsorsium yang terdiri dari tiga lembaga itu (Walestra, ICS, CFES) memberikan sosialisasi terkait perhutanan sosial kepada tokoh masyarakat Lubuk Gadang Selatan, sekira dua tahun lalu.

Hasil sosialisasi itu kemudian ditidakanjuti oleh sidang BAMUS (Badan Musyawarah) dan Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan. Hasil dua sidang penting itulah yang berujung kepada kesepakatan bersama untuk mendorong Pengelolaan Hutan Nagari di Lubuk Gadang Selatan. Kesepakatan bersama itu diperkuat pula dengan pembentukan kelembagaan serta Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Hutan Nagari yang diusulkan kepada Kementerian LHK melalui POKJA Perhutanan Sosial Sumatera Barat.

Elisman adalah tipikal masyarakat desa yang terbuka terhadap informasi luar dan memegang teguh nilai dan adat yang dianut. Dia selalu membuka diri dan menyediakan ruang diskusi dan kerja sama bagi pihak-pihak yang ingin membantu upaya masyarakat menjaga kelestarian hutan dan membantu Pengelolaan Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan. Pria paruh baya dengan topi yang selalu melekat di kepala ini, juga memiliki semangat dan komitmen untuk menjadikan pengelolaan Hutan Nagari Lubuk Selatan sebagai contoh dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Meski perjuangan mendapatkan legalitas Hutan Nagari masih terus dilakukan dan mungkin terwujudnya mimpi itu mereka masih harus menunggu, berbagai upaya menjaga hutan tetap dilakukan kelompoknya.

“Meski SK menteri KLHK belum diterima, kami akan berkomitmen dan berupaya untuk menjaga Hutan Nagari kami,” tegas Elisman.

Dia terus menanti, setelah proses verifikasi Hutan Nagari dilakukan KLHK akhir tahun lalu. Tapi sudah sampai ke tahap itu saja, Elisman mengaku sudah cukup lega. Salah satu tugas dan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua LPHN sudah ia tunaikan.

Sembari menunggu SK Menteri LHK, Elisman bersama rekan-rekannya terus berjuang. Kepengurusan LPHN Lubuk Gadang Selatan terus mengimplementasikan amanah-amanah organisasi yang tertuang dalam Peraturan Nagari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan dan pengelolaan secara lestari dibuktikan dengan dibentuknya **“Lubuak Larangan” yang bekerja sama dengan Pemerintahan Wali Nagari dan Jorong yang berbatasan langsung dengan**

Kawasan Hutan Nagari. Lubuak Larangan telah dimasukkan **sebagai destinasi ekowisata selain “Aie Manyuruak”**.

Ekowisata “Lubuak Larangan” dan “Aie Manyuruak” merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan. Pengelolaannya telah diusulkan oleh LPHN kepada Walinagari dan telah mendapatkan persetujuan oleh BAMUS. Pengelolaan ekowisata di tingkat realisasi dilakukan secara arif berdasarkan peraturan adat setempat.



Gambar 14 Pengurus LPHN Lubuk Gadang Selatan,

Di samping itu, upaya lain yang dilakukan di Hutan Nagari adalah pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pengembangan HHBK yang dilirik oleh LPHN adalah Pengembangan Madu Sialang.

Seperti halnya Elisman, rasa syukur tak terhingga juga diungkapkan Sarbom. Laki-laki 54 tahun itu tak henti-hentinya

menunjukkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang membantunya menggerakkan usaha pengembangan madu sialang.


Sarbom adalah Ketua Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengembangan Madu Sialang yang ditunjuk oleh LPHN Lubuk Gadang Selatan. Dalam menjalankan usaha itu, kelompoknya juga didampingi Konsorsium Perkumpulan Walestra (Walestra, ICS dan CFES) melalui dukungan pendanaan dari ICCTF.

Memang seperti diceritakan Sarbom, pengembangan produksi madu dari LPHN Lubuk Gadang Selatan ini sangat banyak manfaatnya. Tak hanya menawarkan produk jadi berupa madu, orang-orang yang sedang berkunjung atau melakukan wisata alam hutan nagari di Lubuk Gadang Selatan, juga dapat melihat langsung dari dekat tempat budi daya madu yang diusahakan UMKM yang diketuainya.

Seperti rasanya, permintaan madu hasil budi daya itu juga terasa sangat manis bagi UMKM Lubuk Gadang Selatan. Elisman memprediksi permintaan akan HHBK tersebut terus mengalami peningkatan.

“Prediksi jumlah permintaan terhadap produksi lebah madu akan lebih banyak karena selain akan dijual dengan masyarakat semua kalangan seperti warung dan pasar tradisional, lokasi-lokasi wisata, produk ini juga akan dijual di ruang lingkup pasar modern seperti mini market, super market dan mall,” ujar Elisman mantap.

Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan Konsorsium Perkumpulan Walestra bersama LPHN, setidaknya terdapat 4 (empat) strategi pemasaran yang akan dilakukan



oleh LPHN dalam menjual Madu Sialang tersebut. Mereka sudah cukup canggih menggunakan berbagai media publikasi dan cara promosi.

Pertama, mereka gunakan brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan produk yang akan dijual oleh kelompok. Lalu, lewat penjualan langsung. Di sini terjadi promosi dari mulut ke mulut, cara ini efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung promosikan produk yang dijual.

Kelompok penghasil madu ini juga tidak gagap dengan teknologi. Melalui internet mereka juga promosikan produk HHBK yang mereka usahakan. Cara ini mampu memberikan informasi yang cukup massif kepada publik, karena saat ini banyak orang mengakses informasi melalui internet seperti penggunaan *facebook*, *twitter*, *yahoo*, *google* dan lain-lain, hanya lewat ponsel pintarnya.

Cara terakhir, UMKM Lubuk Gadang Selatan ini juga memasarkan madu ke pengunjung wisata Hutan Nagari untuk dikonsumsi langsung di tempat budi daya lebah madu tersebut.

November 2017 pengajuan permohonan pengelolaan Hutan Nagari telah diverifikasi tim dari KLHK. Bulan-bulan setelah itu LPHN Lubuk Gadang Selatan melalui UMKM bentukannya terus menggenjot pemanfaatan HHBK, yaitu lewat memproduksi Madu.

Elisman dan kelompoknya, juga masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan, tidak tahu harus menunggu keputusan penetapan Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan, itu sampai kapan. Namun menjaga dan mengelola hutan nagari tetap dilakukan kelompok dengan penuh semangat.

Ekowisata dan produk HHBK seperti madu menjadi pengisi waktu menunggu yang mendatangkan banyak manfaat.

Menunggu itu berat. Memang berat. Tapi mereka kuat.



Gambar 12 Jernang (Dragon Blood) di Hutan Adat Talun Sakti Desa Raden Anom, Batang Asai, Sarolangun, Jambi

Pengawasan Lebih Terkontrol dengan *SMART Patrol*

Jauh sebelum pengajuan legalitas ke pemerintah daerah, masyarakat Raden Anom sudah mengakui keberadaan hutan adat itu sebagai tinggalan nenek moyang mereka. Namun seiring perkembangan dan tuntutan zaman, pada era 90-an, pengakuan dari dalam (masyarakat) seakan tak mampu menghentikan laju kerusakan hutan di wilayah tersebut.

Safarudin selalu menggebu-gebu ketika bercerita hutan adat. Dia sangat terinspirasi dengan cara bagaimana nenek moyang mereka mengelola hutan. Wo Safar, demikian ia biasa dipanggil, sangat antusias ketika Perkumpulan Walestra datang ke desa mereka dan mendampingi dalam pengajuan hutan adat ke Pemerintah Daerah (Pemda) Sarolangun. Itu sekitar empat tahun lampau.

Usaha mereka berbuah manis. Pada 22 Mei 2015, hutan adat yang mereka usulkan legalitasnya, diakui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 289/BUNHUT/2015 **tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat “Talun Sakti Dusun Muara Seluro” Desa Raden Anom Kecamatan Batang** Asai, Kabupaten Sarolangun. Kelompok mereka sudah maju selangkah.

Namun perjuangan belum berakhir. Mereka sudah harus memulai langkah lainnya, yaitu mengelola dan menjaga hutan adat yang ada, mengamankan dari ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab.

Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Talun Sakti Dusun Muara Salero sudah berjalan dua tahun ketika Perkumpulan Walestra memperkenalkan cara pengamanan hutan adat melalui metode SMART *Patrol*. Bagi Wo Safar, ia tidak harus tahu maksud dari akronim nama metode itu, yang kepanjangannya dalam bahasa yang dia sendiri tidak mengerti. Yang terpikirkan olehnya, cara yang dibawa Walestra pasti akan sangat membantu kelompok dalam menjaga hutan adat yang sudah mendapat legalitas tersebut.

Jasmal, ahli *Geographic Information System* (GIS) pada Perkumpulan Walestra mengatakan, para pengurus KPHA

sangat menikmati sekali metode patroli SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*) yang mereka perkenalkan.

“Saya hanya mendampingi. Mereka yang aktif,” ujar Jasmal menjelaskan bagaimana semangatnya pengurus KPHA menggunakan metode patroli SMART atau SMART *Patrol*.

Dalam mengimplementasikan SMART *Patrol*, kelompok (KPHA) terlebih dahulu akan melaksanakan rapat persiapan. Topik bahasan dalam rapat itu meliputi persiapan tim, perlengkapan (alat dan logistik) yang diperlukan, dan rencana patroli, termasuk juga menentukan rute perjalanan.

Biasanya, rute perjalanan ini berbeda antara saat masuk ke dalam kawasan hutan adat dengan jalur pulang. Para petugas patroli akan menghabiskan waktu selama empat hari untuk memantau kondisi hutan adat.

Sepanjang perjalanan, GPS (*Global Position Point*) dan buku catatan selalu mereka bawa dan disiagakan. Para petugas patroli merekam dan mencatat temuan ancaman terhadap hutan adat. Tim patroli kemudian akan mendiskusikan hasil pantauan mereka kepada pengurus KPHA, sehingga semua temuan bisa diketahui bersama.

Temuan-temuan ancaman di lapangan kemudian akan ditindaklanjuti KPHA, agar ancaman tersebut dapat dicegah dan ditindak berdasarkan hukum adat yang berlaku. Begitulah bagaimana KPHA menerapkan metode SMART *Patrol* dalam patroli yang dilaksanakan secara rutin.

**

Wo Safar selalu mendampingi tim patroli jika sedang melakukan SMART *Patrol* di kawasan Hutan Adat Talun Sakti. Menurut Wo Safar patroli ini penting dilakukan, karena dapat


mengurangi dan mencegah tingkat ancaman dan perusakan hutan adat yang mereka kelola. Ia bersikukuh menjaga hutan adat tersebut, karena dampaknya terasa sangat nyata bagi masyarakat setempat.

“Sumber air dari hutan adat kami ini merupakan ulu Sungai Batang Asai. Sawah-sawah yang ada di dusun, sumber airnya dari Hutan Adat Talun Sakti,” ujar Wo Safar mantap.



Gambar 16 Kuwau Raja (*Argusianus Argus*) Di HA Talun Sakti Desa Raden Anom

Kawasan Hutan Adat Talun Sakti jaraknya cukup jauh. Jika dari pusat desa menuju lokasi, perjalanan bisa menempuh sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) jam dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan terlihat bermacam-macam jenis kayu dengan berbagai diameter, juga rerimbunan daun yang tampak menghijau di kejauhan.



Bukan hanya menawarkan udara yang segar, Hutan Adat Talun Sakti juga menyuguhkan aliran air yang bening, berada di hulu Sungai Batang Asai. Di dalam hutan adat ini juga tersimpan keindahan alam air terjun dengan ketinggian ± 30 Meter. Itulah air terjun Talun Sakti. Nama itu kemudian dijadikan nama hutan adat yang dikelola KPHA di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai yang diketuai Wo Safar.

Jauh sebelum pengajuan legalitas ke pemerintah daerah, masyarakat Raden Anom sudah mengakui keberadaan hutan adat itu sebagai tinggalan nenek moyang mereka. Namun seiring perkembangan dan tuntutan zaman, pada era 90-an, pengakuan dari dalam (masyarakat) seakan tak mampu menghentikan laju kerusakan hutan di wilayah tersebut. Perambahan hutan secara ilegal dan perburuan satwa marak terjadi. Di samping itu, klaim kepemilikan dan penguasaan hutan oleh pemerintah juga datang sebagai ancaman keberadaan hutan adat.

Melihat kondisi ini, pada 1995 para tokoh masyarakat Desa Raden Anom berembung. Melalui perangkat desa, para tetua adat mencoba mengusulkan kawasan hutan adat agar mendapat pengakuan secara resmi dan tertulis dari pemerintah.

Waktu itu masyarakat sangat berkeinginan membuat wilayah kelola untuk melindungi sumber air ke desa mereka. Perambahan hutan gila-gilaan yang terjadi kurun waktu 90-an mengakibatkan air Sungai Batang Seluro semakin surut. Air ini dulunya selalu tersedia berlimpah dan kondisinya jernih.

Di tengah perjalanan, masalah muncul. Proses pengusulan hutan adat tidak berjalan lancar. Masyarakat harus berhenti, namun mereka tidak menyerah. Mimpi hutan adat sepertinya harus menunggu sampai ada datang bantuan.

Sekitar 19 (Sembilan belas) tahun berlalu sejak pengusulan yang kandas, hutan adat tetap diakui di tengah masyarakat. Peluang untuk melegalkan hutan adat terbuka kembali, setelah rencana itu mendapat itikad baik dari Perkumpulan Walestra



Gambar 17 Peta Hutan Adat Talun Sakti Desa Raden Anom/ Dhe-ie

Pada 2014, NGO (*Non-Government Organization*) yang berkonsentrasi pada pendampingan masyarakat sekitar hutan itu berniat membantu dalam upaya pengusulan areal kawasan hutan adat di Desa Raden Anom. Kesiapan masyarakat, bertemu dengan kesempatan didampingi Perkumpulan Walestra, adalah peluang emas mewujudkan mimpi hutan adat yang sempat redup.

Tak menunggu lama. Masyarakat dan Perkumpulan Walestra melakukan serangkaian diskusi bersama. Dari situ mereka mulai mencoba menyusun secara bersama-sama persiapan dan syarat untuk pengusulan kawasan hutan adat. Beberapa dokumen seperti berita acara kesepakatan bersama, surat pengusulan hutan adat, peta administrasi desa dan peta

kawasan hutan adat serta dokumen lainnya yang telah disiapkan, diserahkan kepada Pemda Kabupaten Sarolangun.

Pada 2015, setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Pemda **Sarolangun, Hutan Adat “Talun Sakti Dusun Muara Seluro”** dikukuhkan. Di tingkat desa, keberadaan hutan adat ini diperkuat dengan dikeluarkan dan diberlakukannya Peraturan Desa (PERDES) yang mengadopsi aturan-aturan adat setempat.

Untuk mengkoordinir kawasan hutan adat, lalu dibentuklah pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA). KPHA yang diketuai Safarudin atau Wo Safar, dibantu masyarakat, semakin aktif menjaga dan memanfaatkan hutan adat melalui penanaman bibit tanaman HHBK. KPHA Talun Sakti juga melakukan pengawasan dan penjagaan hutan adat melalui metode *SMART Patrol* yang diperkenalkan Perkumpulan Walestra.

SMART Patrol yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu upaya dalam menjaga kawasan hutan dari tekanan dan ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar desa. Sehingga, kawasan hutan khususnya kawasan hutan adat yang telah dikelola oleh masyarakat bisa terjaga dengan baik.

Metode *SMART Patrol* ini tidak hanya diajarkan kepada Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) yang diketuai Wo Safar, di Desa Raden Anom, Kabupaten Sarolangun. Setidaknya ada sekitar 10 (Sepuluh) KPHA/LPHN yang berada di tiga Kabupaten dari dua provinsi yang didampingi Walestra, mempraktikkan metode ini. Untuk mendampingi KPHA/LPHN di tiga kabupaten tersebut, Perkumpulan Walestra memanfaatkan donasi dari ICCTF dengan co-founding FFI-IP di beberapa tempat.

Metode SMART digunakan dalam patroli pengamanan hutan oleh KPHA Parbokalo Bungkan Yang Empat (Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi). Kemudian, patroli pengamanan hutan oleh KPHA Tujuh Bukit Uluk Ngoh (Kerapatan Adat Pulau Tengah). Patroli pengamanan hutan oleh KPHA Biang Sari (Desa Pengasi Baru). Patroli pengamanan hutan oleh KPHA Muara Mensio dan Benteng Tinggi (Desa Panca Karya). Patroli pengamanan hutan oleh KPHA Mengkadai (Desa Temenggung). Patroli pengamanan hutan oleh LPHN Lubuk Gadang Selatan (Nagari Lubuk Gadang Selatan).

Cara yang sama juga di pakai dalam patroli pengamanan hutan oleh KPHA Sutan Bagindo (Desa Muara Pemuat). Patroli pengamanan hutan oleh LPHN Padang Limau Sundai (Nagari Padang Limau Sundai). Dan Patroli pengamanan hutan oleh LPHN Renah Pantai Cermin (Nagari Renah Pantai Cermin)

Metode SMART *Patrol* banyak membantu masyarakat dalam pengawasan dan penjagaan areal hutan adat dan hutan nagari. Melalui cara ini, pengawasan hutan oleh masyarakat bisa menjadi lebih efektif dan lebih terkontrol.



Gambar 18 Air Terjun Renah Tigo Tenggek

Patroli Pengamanan Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat

Mereka semakin bersemangat menelusuri hutan adat. Lelah, penat, semua hilang oleh pemandangan dan pengalaman yang ditawarkan Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat.

Pagi itu ketika lembah dan perbukitan masih diselimuti awan yang turun tadi malam, Zainal beserta rekan-rekannya telah bersiap-siap di halaman rumah. Mereka akan masuk ke kawasan hutan adat Parbokalo Bungkan Yang Empat.

Dengan membawa ransel berisi logistik untuk selama kegiatan patroli, Zainal dan rekan-rekannya memulai perjalanan. Ditemani dinginnya udara pagi, ditambah lagi dengan selimut kabut yang enggan beranjak dari cakrawala. Rombongan Zainal masuk ke hutan, melawan rasa dingin yang kian menusuk sampai ke tulang.

Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah pematang bukit, sebelum memasuki kawasan hutan adat. Suhu udara makin mendekati 16^o C. Rombongan itu terus melepaskan badan mereka, masuk ke dalam hutan adat.

Zainal dan rekan-rekannya sudah hampir tiba di puncak bukit, ketika awan sedikit demi sedikit mulai menghilang. Kini perjalanan mereka ditemani sinar matahari yang terus meninggi di atas perbukitan.

Di bawah pepohonan di puncak bukit itu, Zainal dan rekan-rekannya beristirahat sejenak. Sekedar melepas penat, menghilangkan dahaga, dan mengerjakan beberapa aktivitas pribadi.

Beberapa saat kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan.

Satu satu mereka muncul dan menghilang di sela-sela pepohonan yang tumbuh dalam kawasan hutan adat Parbokalo Bungkan Yang Empat Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi. Perjalanan patroli terus dilanjutkan sesuai jalur yang sudah disepakati sebelumnya.

Beberapa jejak hewan ditemukan di sepanjang jalur yang dilalui. Ada bekas cakaran beruang di beberapa pohon. Ada jejak kucing hutan ditemukan masih baru ditinggalkan si empunya di atas tanah.

Patroli Zainal dan rekan-rekannya juga diiringi kicauan burung dari berbagai jenis, nun di atas pohon. Mereka semakin bersemangat menelusuri hutan adat. Lelah, penat, semua hilang oleh pemandangan dan pengalaman yang ditawarkan Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat.

“Perjalanan patroli ini pada mulanya dulu cukup melelahkan juga, namun karena sudah biasa dan sudah menjadi tanggung jawab kami dalam menjaga hutan adat ini, kami lakukan dengan hati yang ikhlas,” ungkap Zainal.

Suara gemereng percikan air sudah mulai terdengar dari kejauhan. Semakin lama suara itu semakin jelas. Zainal dan rekan-rekannya pun sampai di salah satu air terjun yang berada di dalam kawasan hutan adat.

Jernih, segar dan alami sekali kelihatannya. Jauh dari ingar bingar dan hiruk-pikuk ala orang-orang kota.

Zainal semakin takjub. Ia membatin. Sumber air inilah yang tak henti-hentinya mengalir memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Desa Talang Tinggi dan Mukai Tinggi. Air ini juga dijadikan sebagai sumber irigasi, mengalir sawah-sawah masyarakat.

“jikalau hutan ini tidak dijaga, maka untuk masa yang akan datang desa kami akan mengalami kekeringan, karena semua kebutuhan air kami berasal dari hutan ini.” Zainal kembali membatin.

la sebenarnya ingin berlama-lama di dalam Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat. Tapi rombongan ini harus segera pulang, karena matahari sudah semakin condong ke barat.



Gambar 19 Salah satu karya pada lomba menggambar ditingkat sekolah dasar yang didukung ICCTF

Melukis Alam, Memupuk Rasa Cinta Lingkungan Sejak Dini

“Jangan Racuni Hutan dengan Kegoisan Kita”

Seorang remaja mengenakan celana warna biru seperti seragam sekolah menengah (SMP) berjalan membawa satu pot berisi sebatang bibit pohon. Matanya terlihat memandangi ke bibit-bibit lain yang sudah ditanam di sekelilingnya. Bibirnya tersenyum puas. Mata bolanya terlihat memancarkan semangat.

Beberapa langkah di depannya, seorang laki-laki paruh baya dengan hati-hati tengah memasukkan bibit pohon ke dalam lobang yang sudah digalinya menggunakan cangkul. Ia terlihat berdiri di atas lututnya. Meski gambaran kesan bibirnya kurang jelas, namun bisa dipastikan orang tua ini juga tersenyum.

Di sekeliling keduanya, tumbuh pepohonan berbagai ukuran. Yang paling kecil adalah yang baru saja mereka tanam.

Cuaca terlihat cerah. Segar dengan dominasi warna hijau, biru dan putih.

Itu tadi adalah gambaran lukisan yang dibuat salah satu peserta lomba melukis tingkat SD se-Kabupaten Sarolangun, yang diselenggarakan Perkumpulan Walestra. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 27 Agustus 2016 lalu itu, bertempat di Lapangan kantor KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun, Kecamatan Sarolangun.

Lomba melukis diikuti oleh 19 peserta dari siswa/siswi tingkat SD dengan kriteria kelas 4 sampai dengan kelas 6. Waktu yang diberikan juri kepada peserta untuk menuangkan kreativitasnya dalam bentuk lukisan kurang lebih selama 120 menit atau 2 jam. Dimulai dari pukul 09:00 sampai dengan 11:00 WIB.

Berdasarkan penilaian kreativitas, keserasian dengan tema dan estetika serta pesan yang disampaikan lewat gambar, keluar sebagai pemenang dalam lomba tersebut :

Juara 1 diraih oleh Restu Amanda dari SD Negeri 3 Sarolangun, Juara 2 Raya Rameyza dari SD Negeri 3 Sarolangun, dan Juara 3 Laudri Alzuhi dari SD Negeri 44 Sarolangun.

Selain menggelar lomba melukis, Perkumpulan Walestra juga menyelenggarakan lomba menulis dan cerdas cermat dengan mengusung tema perubahan iklim. Kegiatan ini bertujuan untuk **“menghantarkan semangat menanamkan nilai-nilai konservasi sejak dini kepada masyarakat”**.

Lomba menulis diikuti siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sementara lomba cerdas cermat, pesertanya berasal dari pelajar sekolah menengah pertama (SMP) sederajat.

**

Dua orang laki-laki berada dalam satu perahu terlihat asyik melepaskan mata kailnya di tengah perairan yang jernih. Di belakang mereka ikan-ikan berukuran besar melompati permukaan air membentuk setengah lingkaran.

Satu tarikan garis lurus di belakang perahu dua orang tadi, seorang laki-laki lainnya sedang mangayuh sampannya di antara ikan-ikan yang terlihat melompati permukaan air.

Di sekeliling mereka, pohon-pohon besar tumbuh dengan subur. Daun-daunnya rimbun. Di bawahnya rumput-rumput hijau menggumpal membentuk gundukan-gundukan kecil. Sementara matahari tak terlihat muncul di atas mega. Hanya pantulan sinarnya seperti tenggelam di dasar air. Sementara langit di

atas tiga laki-laki itu didominasi warna jingga seakan menunjukkan jika hari sudah beranjak senja.

Itulah lukisan hasil karya Restu Amanda dari SD Negeri 3 Sarolangun yang berhasil memikat hati juri dan meraih Juara 1.

Dalam lomba melukis yang diselenggarakan, Perkumpulan Walestra bermaksud agar nilai-nilai konservasi bisa tersosialisasi dan dipegang teguh masyarakat sejak dini. Menanamkan kecintaan untuk melestarikan hutan memang harus dilakukan sejak masa sekolah dasar. Ini agar nilai-nilai tersebut melekat hingga terbawa sampai mereka (generasi penerus) beranjak dewasa.

Memahami alam dan memiliki semangat melestarikan hutan sejak awal, akan membantu melatih manusia menekan egoisme dasarnya yang hanya mengejar materi tanpa berpikir lebih banyak untuk keberlangsungan alam dan lingkungan hutan. Egoisme pribadi yang mengeksploitasi hutan tanpa mau menjaga dan menanam kembali, itu adalah kesalahan fatal manusia yang tak jarang berbuah bencana.

Maka, rangkaian perlombaan yang diselenggarakan Perkumpulan Walestra juga membangun kesadaran agar **“Jangan Racuni Hutan dengan Kegoisan Kita”**. Larangan dan peringatan itu ditulis Sonya Trikandi sebagai judul artikelnya yang memenangkan lomba menulis tingkat SMA se-Kabupaten Sarolangun yang diselenggarakan Perkumpulan Walestra.



Gambar 20 Suasana FGD Bersama Pengurus KPHA Biangsari

Merawat Semangat Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Masyarakat

Jika memegang teguh adat dan aturan di nagarinya, masyarakat sejatinya sudah menjaga kawasan hutan, dan melakukan berbagai upaya penjagaan agar hubungan antara alam dan manusia tetap seimbang.

Ketika banyak kampus, forum-forum seminar dan diskusi membicarakan tentang mitigasi perubahan iklim, masyarakat di desa-desa nun jauh dari hiruk-pikuk perdebatan itu sudah melakukan aksi nyata mencegah laju kerusakan bumi. Kehadiran lembaga pendampingan, advokasi, seperti Walestra, menjadi semacam pelengkap sekaligus penguat upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat masyarakat.

Jefri Nurrahman, Program Manager Perkumpulan Walestra menyebut upaya yang dilakukan pihaknya di lapangan lebih kepada merapikan dan memberi tambahan daya bagi kerja-kerja penyelamatan bumi yang secara tradisional dan tanpa sadar sudah dilakoni masyarakat di desa. Misalnya, masyarakat desa sudah sejak lama menjaga areal hutan di daerahnya. Lewat serangkaian kebiasaan dan aturan adat yang dipatuhi bersama. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka beratahan dengan cara mengolah lahan dengan menanam jenis tanaman yang secara turun-temurun menganut sistem yang mengarah ke *agroforestry*.

Sebagaimana dikatakan salah satu tokoh adat di Kecamatan **Siulak Mukai, Kerinci, “Tanaman palawija mengantarkan tanaman kopi, Kopi mengantarkan tanaman kayu manis.”**

Dengan cara itu saja, termasuk pemilihan jenis tanaman, masyarakat sudah membantu menyumbang upaya menjaga lingkungan agar tetap baik dan seimbang.

Hasil dari pertanian inilah yang dikelola masyarakat dan dijadikan sumber utama pendapatan keluarga. Budaya masuk dan membuka hutan tidak dilakukan lagi sejak bertahun-tahun lalu.

Pengolahan hasil panen, seperti buah kopi menjadi beras kopi dan bahkan menjadi kopi bubuk di Kerinci, minyak kepayang di Sarolangun, budi daya lebah madu di Solok Selatan, adalah cara kreatif warga yang tinggal di desa-desa sepanjang Taman Nasional Kerinci Seblat untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tetap bersahabat dengan alam, menjaga lingkungan, bahkan membantu upaya pelestarian alam.

Dari latar belakang itulah, penguatan strategi mitigasi perubahan iklim lewat berbagai upaya pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya atau potensi lokal, menjadi cara yang ampuh yang ditempuh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

“Perkumpulan Walestra, melalui support ICCTF, telah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan ekonomi lokal dengan tetap menjaga kelestarian alam, menjaga hutan,” kata Jefri.

Masyarakat yang berada di desa-desa dampingan Perkumpulan Walestra membentuk suatu kelompok usaha bersama. Kelompok ini secara struktural diletakkan di bawah naungan KPHA/KPHP/LPHN. Melalui kelompok yang dibentuk, masyarakat desa bisa mendapatkan tambahan nilai ekonomi dari pengolahan hasil komoditas lokal yang diusahakan bersama-sama. Pemilihan komoditas yang akan diintensifkan pengelolaannya lewat kelompok, juga telah melewati serangkaian studi kelayakan, pelacakan atau identifikasi

potensi lokal, dan sebagai hasil kesepakatan bersama masyarakat.

Di Mukai Tinggi dan Talang Tinggi misalnya, anggota kelompok sepakat membuat usaha penggilingan biji kopi. Walaupun pada kenyataannya, usaha yang dikelola saat ini lebih kepada peran kelompok sebagai lembaga yang menyediakan peralatan atau mesin penggiling/pencacah kopi dengan menarik sejumlah uang sewa.

Dengan cara ini, setiap petani yang ingin mengolah hasil kebunnya sehingga memberikan nilai tambah dan harga jual, bisa menggunakan alat penggilingan yang dimiliki kelompok. Produk dari pengolahan itu berupa beras kopi.

Tokoh adat setempat seperti Depati Intan Tengah Padang, Idrus Salim, meyakini ke depannya akan berkembang menjadi usaha **pengolahan kopi sampai menghasilkan kopi bubuk. “Apalagi tempo hari sudah ada pembibitan tanaman kopi dan ditanam di ladang warga, yang juga didampingi Walestra,”** kata Idrus Salim beberapa waktu lalu.



Gambar 21 Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan masyarakat

Jefri Nurrahman, Program Manager Perkumpulan Walestra mengatakan, pihaknya memberikan berbagai bentuk stimulan untuk kemajuan kelompok usaha kopi ini, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, dan tetap terjaganya kondisi hutan di daerah yang mereka dampingi.

“Di sini selain mendampingi dalam penguatan kelembagaan kelompok dan memberikan *insight* terkait usaha yang dikelola, Perkumpulan Walestra juga menyalurkan bantuan peralatan produksi seperti mesin penggiling atau pencacah,” terang Jefri.

Alat untuk usaha penggilingan kopi, setelah diserahterimakan, akan menjadi milik bersama. Kepemilikan kelompok atas nama seluruh anggota. Bagi masyarakat ataupun anggota yang ingin menggunakan alat tersebut untuk mengolah buah kopi miliknya, kelompok sepakat untuk mengenakan sewa per kilogram biji kopi yang akan diolah.

“Mengeni sewanya mereka sepakat Rp 2.000 per kilogram.”

Biji kopi yang sudah melewati pengolahan dan menjadi beras kopi, setelah dikeringkan kemudian dijual ke pasar terdekat.

“Hasil beras kopi itu dijual masyarakat ke Pasar Siulak Mukai,” ujar Jefri.

**

Lain di Mukai lain pula di Pengasi Baru. Di desa ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok perempuan, sepakat mengusahakan pengolahan biji kopi sampai menghasilkan produk jadi berupa kopi bubuk. Meski demikian, kelompok juga mengusahakan kegiatan penggilingan biji kopi basah menjadi beras kopi, untuk memenuhi bahan baku pembuat bubuk kopi.

Kelompok yang terdiri dari kaum perempuan bersama-sama menggerakkan dua kegiatan pengolahan kopi ini dengan didampingi fasilitator desa dari Perkumpulan Walestra.

“Mereka sepakat (kelompok perempuan) bergerak di bidang pengolahan biji kopi, sampai menjadi bubuk kopi,” sebut Jefri.

Kopi bubuk yang dihasilkan dari kelompok ini langsung dikemas dan diberi nama. Merek dagang yang disepakati bersama **masyarakat adalah “Kopi Biang Sari”**. Untuk kemasan, kelompok mendapat bantuan awal kemasan dari bahan alumunium foil. Kopi dimasukkan ke dalam kemasan alumunium foil dengan ukuran tertentu, lalu bagian ujung kemasan direkatkan menggunakan alat *sealer*.

Penggunaan alumunium foil sebagai kemasan, kata Jefri, dipilih karena memperhatikan beberapa pertimbangan.

“Aluminium foil lebih efektif untuk menjaga rasa dan kelembapan kopi, dibanding jika kemasan terbuat dari bahan plastik,” katanya.

Namun, untuk hasil yang lebih memuaskan, Jefri menyebut masih perlu dilakukan beberapa *finishing*. Misalnya, setelah dibungkus menggunakan aluminium foil, ditambahkan kemasan pembungkus yang sudah didesain khusus. Lalu soal sterilisasi proses, hingga menjadi produk juga penting, agar produk bisa lolos uji ketika didaftarkan BPOM dan perizinan lainnya.

Saat ini kelompok usaha **“Kopi Biangsari”** yang didampingi Perkumpulan Walestra sudah menghasilkan kopi bubuk dengan dua macam ukuran kemasan. Yaitu, kemasan aluminium foil dengan ukuran ¼ kg dan kemasan berukuran ½ kg.

Pemasaran produk tersebut masih terbatas di dalam desa. Kopi bubuk yang dihasilkan kelompok dijual dan dikonsumsi masyarakat Desa Pengasi Baru dan pendatang yang ingin membawa sekedar oleh-oleh.

“Pemerintah/pengurus adat setempat juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat mengonsumsi kopi bubuk hasil olahan kelompok usaha perempuan tersebut,” kata Jefri bersemangat.

“Jadi polanya, kopinya meraka nanam sendiri, panen sendiri, olah sendiri, dan—untuk sementara—konsumsi sendiri.”

Memang di daerah kerinci yang berhawa sejuk, ngopi (minum kopi) adalah kebiasaan yang sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat. Di mana pun berkunjung, bagi tamu yang datang, terutama pemilik rumah, minum kopi adalah semacam tradisi yang tidak boleh tinggal. Kopi adalah minuman terpopuler


kedua setelah air putih. Belakangan, minum kopi juga menjadi tren yang meluas. Orang-orang meneguk kopi, dari warung kopi ukuran rata-rata sampai gerai dan tempat kongko berkelas.

Kopi Biang Sari yang diproduksi oleh kelompok usaha perempuan Desa Pengasi Baru belum bisa dipasarkan ke luar desa, selain dikarenakan jumlah produksi yang masih sedikit, juga terkendala dengan perizinan. Izin PIRT untuk produk asli Desa Pengasi Baru ini hingga kini belum terbit. Jefri menyebut, kelompok ini dengan didampingi Perkumpulan Walestra tengah mengurus perizinan untuk produk olahan yang diminati banyak orang tersebut.

Sama dengan komoditas pertanian dari jenis tanaman tahunan lainnya, panen kopi tentu juga memiliki masa panen raya dan ada kalanya panen buah hanya sedikit. Hal ini akan memengaruhi ketersediaan bahan baku untuk menghasilkan bubuk Kopi Biang Sari. Buah kopi yang dihasilkan dari kebun warga ada kalanya tidak memenuhi kebutuhan produksi. Namun, dari pengalaman selama ini, Jefri memperkirakan kalau pengolahan Kopi Biang Sari tetap jalan dengan perkiraan jumlah produksi berkisar di angka 50 kg per hari.

Selain menghasilkan kopi bubuk, dan mengelola mesin penggilingan atau pencacah yang menghasilkan beras kopi yang menjadi bahan baku untuk memproduksi Kopi Bubuk Biang Sari, kelompok juga menawarkan jasa penggilingan kopi. Masyarakat yang bukan anggota kelompok diberi kebebasan untuk menggunakan alat penggilingan kopi dengan membayar sejumlah uang sewa. Kelompok mematok harga sewa sebesar Rp 1.000 per kilogram.

**



Di desa dampingan Walestra lainnya, di Kabupaten Sarolangun, dengan jarak tempuh perjalanan darat lebih 240 kilometer dari Ibukota Kabupaten Kerinci menuju Jambi, usaha yang dipilih masyarakat cukup jauh berbeda. Mereka lebih mengandalkan tanaman HHBK yang lebih banyak tumbuh liar ketimbang tanaman yang dibudidayakan di lahan warga. Salah satu potensi lokal yang ada di Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah kepayang. Menurut pengakuan warga, di daerah ini pohon dengan nama latin *Pangium edule Reinw* ini tumbuh liar dan setengah liar. Kepayang tumbuh dengan sendirinya di hutan adat dan lahan warga, namun ada pula yang sengaja ditanam.

Di Desa Muara Pemuat, buah kepayang tersedia lebih banyak dibanding desa-desa lain yang ada di Kecamatan Batang Asai, karena di desa ini pula terdapat pohon kepayang dalam jumlah lebih banyak. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMKM di bawah KPHA Sutan Bagindo Muaro Pemuat sepakat memproduksi minyak kepayang. Perkumpulan Walestra kemudian *mensupport* melalui penguatan kelembagaan, peralatan dan pendampingan lainnya.


“Jadi mereka secara kolektif mengelola usaha minyak kepayang di bawah KPHA,” kata Jefri, sembari memperlihatkan sebotol



Gambar 22 Buah KePAYANG

minyak kepayang yang diproduksi kelompok usaha KPHA Sutan Bagindo Desa Muara Pemuat.

“KePAYANG diambil dari dalam hutan adat dan yang tumbuh di lahan-lahan warga. Setelah melewati serangkaian proses pengolahan, hasilnya, berupa minyak kepayang siap konsumsi.”



Sama dengan usaha Kopi Biang Sari, minyak kepayang yang diproduksi kelompok usaha di bawah naungan KPHA Sutan Bagindo Desa Muara Pematang juga belum memiliki izin PIRT.

Minyak kepayang tersebut dikemas dalam wadah berupa botol plastik. Sampai saat ini, minyak kepayang baru diproduksi untuk memenuhi permintaan masyarakat setempat. Minyak kepayang yang dihasilkan kelompok usaha KPHA Sutan Bagindo Muara Pematang juga masih terbatas untuk konsumsi kalangan masyarakat setempat.

**

Selain mengusahakan produk dari sumber nabati (dari tumbuh-tumbuhan), ada pula kelompok dampingan Perkumpulan Walestra yang memanfaatkan sumber hewani. Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, masyarakat yang tergabung dalam LPHN sepakat mengelola usaha lebah madu. Budi daya lebah madu sudah ditekuni beberapa warga sebelumnya. Pemerintah Nagari Lubuk Gadang Selatan juga sangat *support* kegiatan pembudidayaan lebah madu, apalagi pihak pemerintah juga menjanjikan sejumlah dana untuk pengelolaan usaha ini. Ditambah lagi jika kegiatan ini dikolaborasikan dengan ekowisata yang terdapat di Nagari Lubuk Gadang Selatan, dinilai akan mendatangkan keuntungan untuk dua sektor (usaha budi daya lebah madu dan pariwisata).

Nofrianto, Sekretris Nagari Lubuk Gadang Selatan, mengatakan bahwa dalam perencanaan Nagari Lubuk Gadang Selatan, Pemerintahan Nagari akan menjadikan budi daya lebah madu sebagai usaha unggulan.



Gambar 23 Kemasan Madu Lebah

“Ke depan, usaha budi daya lebah madu ini memang akan dijadikan usaha unggulan dari Nagari Lubuk Gadang Selatan, dan kami dari pemerintahan nagari sudah menganggarkan

dana untuk tahun 2018 untuk pengelola usaha budi daya lebah madu. Saat ini menunggu rapat paripurna bersama Badan Permusyawarah Nagari (BPN) **Lubuk Gadang Selatan,” kata Nofrianto**, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Konsorsium Perkumpulan Walestra akhir Agustus 2017.

Dari FGD yang dilakukan, diperoleh kesepakatan bersama bahwa seluruh peserta yang hadir memilih budi daya Lebah Madu untuk dijadikan usaha kelompok yang akan dijadikan unggulan nagari. Usaha budi daya lebah madu ini kemudian dikelola kelompok usaha yang diketuai Sarbom di bawah naungan LPHN Lubuk Gadang Selatan.

**

Masih di Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, desa dampingan Perkumpulan Walestra lainnya adalah Nagari Sako Utara Pasir Talang. Di nagari ini, masyarakat juga sudah berembug dan menghasilkan keputusan bersama untuk melakukan kegiatan usaha berbasis HHBK, yaitu kerajinan dari rotan.

Selain sudah memiliki pengrajin rotan yang sudah memasarkan hasilnya hingga ke luar daerah, Nagari Sako Utara Pasir Talang juga mempunyai banyak rotan dan bambu. Pohon Bambu dan rotan tersedia dalam jumlah berlimpah di dalam kawasan Hutan Nagari Sako Utara Pasir Talang.

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditi lokal potensi HHBK di Nagari Sako Utara Pasir Talang menghasilkan berbagai kerajinan berbahan rotan, seperti miniatur Rumah Gadang, dan lain sebagainya. Hasil kerajinan kelompok usaha LPHN Sako Utara Pasir Talang kemudian menjadi cinderamata khas yang memiliki daya jual yang baik ketika disandingkan dengan program pemerintah daerah yang

menjadikan Solok Selatan sebagai tujuan wisata dengan tagline **“Nagari Seribu Rumah Gadang”**.

Kesemua kegiatan yang dilakukan masyarakat di desa-desa dampingan Perkumpulan Walestra inilah yang disebut Jefri Nurrahman sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan masyarakat, sejak lama. Jefri kembali menegaskan, jika memegang teguh adat dan aturan di nagarinya, masyarakat sejatinya sudah menjaga kawasan hutan, dan melakukan berbagai upaya penjagaan agar hubungan antara alam dan manusia tetap seimbang.

“Itu (mitigasi perubahan iklim) sudah mereka lakukan sebenarnya. Kita hanya memberikan penguatan dan melengkapi dengan berbagai cara dan pengetahuan modern. Kalau adat dan nilai yang disepakati di dalam desa/nagari tetap dirawat, kelestarian alam dan lingkungan bisa tetap terjaga. Itu sama dengan upaya mitigasi perubahan iklim yang **tanpa sadar sudah mereka lakukan.”**



Gambar 34 Kelompok Perempuan Kopi Bubuk "Biangsari"

Kisah Pendampingan Fauzi: Sakit oleh Pembibitan, Tertawa karena 'Kacang Tojin'

Menjadi bagian dari masyarakat di desa yang jauh bukan hal yang mudah bagi orang luar. Kecurigaan dan penolakan biasa datang sebelum sempat berbaur menyatu bersama warga setempat. Fauzi juga pernah mengalami hal serupa.

Lima orang berbeda usia terlihat duduk melingkar mengitari meja tamu di rumah Sujardi, Jumat (16/02/2018) pagi. Mereka terlibat obrolan renyah dengan seorang fasilitator desa dari Perkumpulan Walestra. Fauzi, fasilitator Walestra adalah yang paling muda di antara orang-orang yang asyik *ngota* tersebut.

Bila tema obrolan semakin menarik, kadang Fauzi berdiri dari tempat duduknya. Mengacungkan telapak tangan kanan yang disambut laki-laki 60-an tahun duduk di kursi di depannya dengan gerakan serupa. Mereka melakukan tos (*high five*) untuk menunjukkan ekspresi saling mendukung, terlebih sedang bahagia dengan obrolan santai pagi itu.

Fauzi sudah sangat dekat dengan orang-orang Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman. Di desa ini, dia sudah seperti di kampung halaman kedua. Para orang tua, terutama kalangan pengurus adat, sudah mengenal baik dirinya.

Alhasil, misi tugasnya datang ke salah satu desa yang berada sangat dekat dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini, bisa diterima dan bahkan sangat didukung tokoh dan masyarakat setempat.

Dulu ia pernah bersama masyarakat melakukan pembibitan. Kegiatan lainnya, Fauzi memfasilitasi penerapan metode SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*) Patrol untuk patrol rutin hutan adat oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Biang Sari.

Masih ada sejumlah sub kegiatan dan program dari Perkumpulan Walestra yang difasilitasi Fauzi di Pengasi Baru. Ia mengaku tak menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Yang difasilitasi sudah menganggap kehadiran Fauzi sebagai bagian dari mereka. Itulah kunci penting dari misi besar seorang fasilitator program. Nilai ini tentu berlaku sama untuk semua kegiatan pendampingan masyarakat.

Lima orang berbeda usia tetap asyik terlibat obrolan. Sementara matahari pagi sudah mulai menanjak.

Tak berapa lama kemudian, kelimanya seakan sepakat menyelesaikan obrolan. Satu satu mereka berpamitan. Kelimanya kembali ke aktivitas masing-masing.

Menjadi bagian dari masyarakat di desa yang jauh bukan hal yang mudah bagi orang luar. Kecurigaan dan penolakan biasa datang sebelum sempat berbaur menyatu bersama warga setempat. Fauzi juga pernah mengalami hal serupa.

“Dulu sempat juga ada yang secara terang-terangan menolak kegiatan saya (Walestra, *pen*) di desa itu,” cerita Fauzi dalam perjalanan pulang ke *basecamp* Perkumpulan Walestra di Kota Sungai Penuh.

Waktu itu Perkumpulan Walestra baru mulai mengajak masyarakat setempat melakukan pembibitan. Masih awal-awal pembuatan naungan, ada oknum yang entah karena belum begitu paham maksud kegiatan atau karena hal lain, mengeluarkan ungkapan penolakan saat Fauzi asyik membaur bersama sekelompok orang.

“Sakit, sedih, kesal dan mau marah juga rasanya,” ungkap Fauzi.

Ia tak lantas menjawab pernyataan dan tuduhan dari oknum yang diceritakannya. Karena, menurutnya memang hal itu tidak perlu dia jawab. Ia jalan terus dengan program yang

dibawa Walestra. Yang ia lihat bukan berapa orang yang menolak, tapi banyak orang yang akan mendapatkan manfaat.

“Tapi itu dulu. Setelah agak lama kegiatan berlangsung penolakan tidak ada lagi,” kenang Fauzi.

Sekarang dia merasa, masyarakat Pengasi Baru sangat terbuka menerima kehadirannya. Beragam program disambut dengan antusiasme tinggi masyarakat.

**

Motor lapangan yang dikendarai Fauzi semakin jauh meninggalkan desa Pengasi Baru. Melewati Desa Pengasi Lama, Danau Kerinci, dan desa-desa lainnya. Tak terasa ia sudah menempuh hampir 20 kilometer perjalanan darat.

Sepanjang perjalanan, Fauzi terus memikirkan peralatan membuat olahan dari jenis kacang-kacangan yang sudah diserahkan ke kelompok dampungannya di desa yang lain. *Handgrip* motor yang ia kendarai diputarnya lagi beberapa derajat. Bebek pemakan bensin itu makin melaju dengan kecepatan sekian kilometer per jam.

Sebelum Jumat, Fauzi bertekad harus sudah berada di *basecamp*. Sorenya ia akan melanjutkan mendatangi Wilayah Kerapatan Adat Pulau Tengah, berjumpa beberapa kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya kelompok penghasil Kacang Tojin (Kacang *Tujin*).

Entah kenapa, menyebut hasil olahan kacang kedelai dan kacang merah itu sering dia lakukan disertai senyum geli. **Bahkan nama ‘Kacang Tojin’ kadang terlihat ia ucapkan diikuti tawa.**



Gambar 25 Hasil usaha Kelompok Perempuan di WKA Pulau Tengah

UMKM Kacang Tujin

“Mereka membangun dan mempertahankan usaha Kacang Tujin ini sampai sekarang, menempuh perjalanan berliku-liku,”

April 2017, bulan diperingatinya Hari Bumi tahun itu adalah waktu dimulainya pengembangan usaha Kacang Tujin oleh masyarakat Desa Limok Manaih Wilayah Kerapatan Adat Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Fasilitator Desa dari Perkumpulan Walestra melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama masyarakat untuk menyusun rencana bisnis pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di daerah itu, di rumah Zakiyah, salah satu warga Limok Manaih. Hari itu juga dibentuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kacang Tujin Desa Limok Manaih.

Pemilihan Kacang Tujin sebagai produk yang akan dikembangkan kelompok, alasannya karena bahan baku untuk produk ini tersedia dalam jumlah banyak di Wilayah Kerapatan Adat Pulau Tengah. Kacang Tujin terbuat dari Kacang Merah. Jenis kacang-kacangan ini biasa digunakan sebagai campuran dalam jajanan es campur.

Wardani, salah satu anggota kelompok, mengatakan kalau jenis kacang ini tersedia berlimpah.

“Di pulau tengah ini rata-rata petani menanam kacang merah,” kata dia.

Selama ini, Kacang Merah hanya dijual begitu saja, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Biasanya petani akan menjual hasil panennya setelah melewati proses penjemuran.

Dengan terbentuknya Kelompok UMKM Kacang Tujin, Perkumpulan Walestra semakin mudah melakukan pendampingan dan pembinaan. Selain diberikan pelatihan,



kepada kelompok ini juga diberikan bantuan alat sarana produksi.

Penyerahan alat itu dilakukan setelah kelompok benar-benar jalan dan telah mengikuti serangkaian uji kelayakan. Di sini Walestra menerapkan kriteria yang cukup ketat, sebelum memberikan bantuan.

Saat ini, kelompok yang diketuai Zakiyah sudah memproduksi Kacang Tujin dalam kapasitas produksi yang semakin besar. Produk yang dibuat kelompok beranggotakan kaum perempuan di Wilayah Kerapatan Adat Pulau Tengah itu dipasarkan di desa setempat hingga sampai ke luar desa.

Produk Kacang Tujin yang mereka hasilkan dikemas sedemikian rupa. Sementara hasil penjualan produk tersebut dibukukan dengan rapi. Pembukuan selalu dilakukan setiap produksi.

Uang yang diperoleh dari kegiatan usaha ini sebagian dibagikan ke anggota dengan persentase yang sudah ditentukan. Sementara sebagian lainnya disimpan untuk kas kelompok. Begitulah Kelompok UMKM Kacang Tujin berjalan dari hari ke hari.

“Mereka membangun dan mempertahankan usaha Kacang Tujin ini sampai sekarang, menempuh perjalanan berliku-liku,” kata Fauzi, Fasilitator Desa dari Perkumpulan Walestra. Saya malah tersenyum sendiri ketika mendapatkan keterangan dari Fauzi. Pesan singkat darinya saya baca sambil menebak-nebak bagaimana reaksi Fauzi ketika menyebut “Kacang Tujin” dalam tulisan pesan *whatsapp*.

Saat berkirim pesan dengan saya, waktu itu, Fauzi sudah sedang berada di Kerinci. Salah satu kegiatannya menurut dia masih berkuat pada kegiatan pendampingan kelompok UMKM. Di Wilayah Kerapatan Adat Pulau Tengah saja, selain Kelompok Kacang Tujin, Perkumpulan Walestra juga membina Kelompok UMKM Kacang Sangrai dan Dodol Alpukat.



Gambar 26 ilustrasi gagal perhutanan sosial

Faktor X (Gagal) Perhutanan Sosial

“Politik lokal sangat memengaruhi, dan justru malah sangat menentukan.”

Seringkali rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan tidak beriringan, bahkan berseberangan. Skema perhutanan sosial oleh Konsorsium Perkumpulan Walestra pun mengalami berbagai kesulitan pada implementasi kegiatannya. Bukan berarti tidak direncanakan dengan matang. Terkadang faktor X, yang tadinya sangat mendukung, justru berbalik seakan tak hendak memuluskan terwujudnya cita-cita bersama masyarakat itu.

“Politik lokal sangat memengaruhi, dan justru malah sangat menentukan,” ujar Jefri, Program Manager Perkumpulan Walestra, tegas.

“Terutama saat berhadapan dengan kebijakan di tingkat lokal dan perubahan aturan di tingkat pusat,” kata Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Walestra, menimpali.


Di kantor Perkumpulan Walestra Jl Kaca Piring II nomor 55 RT 21 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Selasa, 30 Januari 2018, Riko bercerita banyak. Dia menggarisbawahi bagaimana perubahan aturan di tingkat pusat membuat pegiat lingkungan terutama perhutanan sosial dari konsorsium Perkumpulan Walestra kelabakan.

Ketika putusan MK tahun 2012 ditimpa dengan Permen LHK yang keluar kurang lebih empat tahun setelahnya, pengusulan legalitas hutan adat yang didampingi Konsorsium Perkumpulan Walestra mendapat masalah baru.

Pengajuan legalitas hutan adat menjadi berbelit-belit. Rumit.

“Perubahan itu terjadi saat kegiatan sudah jalan,” ujar Riko.

“Kesulitan kita adalah, mensinkronkan kedua aturan tersebut,” kejar Jefri.



Sebelumnya, putusan MK nomor 35 telah secara jelas mengkhususkan pengakuan terhadap hutan adat menjadi hak masyarakat adat. Namun, setelah keluarnya Permen LHK nomor 83 tahun 2016, hutan adat seakan dikembalikan kepada Negara lewat skema perhutanan sosial.

“Kita kesulitan ketika harus menemukan berbagai persoalan baru yang timbul akibat kebijakan itu,” jelas Riko.

Menurutnya bukan hanya masalah peraturan dan nuansa politik lokal, sumber daya penyelenggara pemerintahan daerah juga sangat menentukan terhadap mulus dan tidaknya program perhutanan sosial yang makin banyak dilakukan di desa-desa.

Terkadang instrumen di tingkat lokal tidak tersedia atau kalau pun ada malah belum siap menjalankan peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Tak jarang, untuk mengurus legalitas satu lokasi hutan adat saja, membutuhkan waktu bertahun-tahun yang hanya berkulat pada menyerahkan, melengkapi, dan menunggu perkembangan diprosesnya dokumen usulan dengan bermacam-macam syarat.

Rumitnya proses pengajuan hak kelola hutan dengan skema perhutanan sosial tersebut memang lebih banyak disebabkan faktor-faktor yang terlihat sederhana namun cukup menentukan. Dikatakan Riko, niat pemerintah untuk menambah luasan cadangan hutan melalui skema perhutanan sosial perlu penyederhanaan dalam peraturan dan implementasinya. Hal ini untuk memudahkan terwujudnya cita-cita serta komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam mewujudkan target program perhutanan sosial yang mencapai 12,7 juta hektar.

---XXX---

Glosarium

<i>Agroforestry</i>	: Sistem pertanian tanaman pangan dan tanaman kehutanan yang ditanam dalam lahan yang sama
APL	: Areal Penggunaan Lain
BAMUS	: Badan Musyawarah
BPOM	: Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan
<i>Basecamp</i>	: Barak Pangkalan ; Walestra = Kantor sementara di daerah yang sekaligus berfungsi sebagai tempat menginap tim Walestra
CFES	: <i>Community Forest Ecosystem Services</i>
Depati	: Pemimpin suku
FFI-IP	: <i>Fauna dan Flora International Indonesia Program</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
GIS	: <i>Geographic Information System</i>
GPS	: <i>Global Position Point</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti Pinang, Jengkol, Petai dan Jernang)
HHK	: Hasil Hutan Kayu
HN	: Hutan Nagari
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan

HTI	: Hutan Tanaman Industri
ICCTF	: Indonesia <i>Climate Change Trust Fund</i>
ICS	: <i>Institution Concervation Society</i>
<i>Kalbu</i>	: Pembagian berdasarkan keturunan dalam satu suku
Kerinci Seblat	: Taman Nasional Kerinci Seblat
Kedepatian	: Wilayah kekuasaan/pengaruh depati
Kemen LHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Konsorsium Perkumpulan Walestra	: Himpunan tiga organisasi non pemerintah, yakni Walestra, CFES dan ICS
KPHA	: Kelompok Pengelola Hutan Adat
KPHP	: Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
LH	: Lingkungan Hidup/ Dinas LH (Dinas Lingkungan Hidup)
LPHN	: Lembaga Pengelola Hutan Nagari
Mitigasi	: Tindakan mengurangi dampak bencana
MK	: Mahkamah Konstitusi
NGO	: <i>Non-Government Organization</i> / Organisasi Non Pemerintah (Ornop)
Permen LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perdes	: Peraturan Desa
Perhutanan Sosial	: Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. (foresteract)
PHBM	: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro
POKJA	: Kelompok Kerja
Rehabilitasi	: Pemulihan kepada keadaan yang dahulu (semula)
Replikasi	: Proses, cara meniru; penduplikatan
SK	: Surat Keputusan
SMART <i>Patrol</i>	: <i>Spatial Monitoring and Reporting Tool Patrol</i>
TNKS	: Taman Nasional Kerinci Seblat
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Walestra	: Wahana Pelestarian dan Advokasi Hutan Sumatera

Tim Konsorsium Proyek ICCTF Perkumpulan Walestra



Nama : Riko Kurniawan
TTL : Rantau Rasau, 6 Maret 1986
Email : riko_jambak86@yahoo.com
Posisi : Penanggung Jawab Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Jefri Nurrahman
TTL : Jambi, 31 Januari 1986
Email : go.jefri@gmail.com
Posisi : Manager/Koordinator Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Jasmal
TTL : Pangkalan Jambu, 01 Desember 1985
Email : cakramasurai@rocketmail.com
Posisi : GIS Officer Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Margareta
TTL : Jambi, 22 Maret 1990
Email : margaretharopeng@gmail.com
Posisi : Finance Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Mustaem
TTL : Bawah Buluh, 21 Juli 1988
Email : mustaemalbadri@gmail.com
Posisi : Fasilitator Desa Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Muhammad Fauzi
TTL : Pekan Jumat, 02 Februari 1992
Email : fauzibae2@gmail.com
Posisi : Fasilitator Desa Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Ridho Arrazak
TTL :
Email : mrg.ridhoarrazak@gmail.com
Posisi : Fasilitator Desa Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Oktaripin Depis
TTL : Tanjung Durian, 04 Mei 1989
Email :
Posisi : Fasilitator Desa Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra



Nama : Nadia Yuli Ambarwati
TTL : Madiun, 16 Agustus 1992
Email : nadiayua@gmail.com
Posisi : Staf Administrasi Program Swakelola ICCTF –
Konsorsium Perkumpulan Walestra

Tentang Penulis

Jhoni Imron. Lebih sering dipanggil Jhoni. Juga bisa dipanggil Imron. Lahir di Merangin, Jambi, tanggal 10 Juni 1986. Sudah terbiasa masuk - keluar hutan sejak kecil. Mulai hobi menulis sejak menginjak Sekolah Menengah Pertama. Semasa kuliah menekuni dunia pers kampus, mengikuti berbagai pelatihan menulis, serta menerbitkan buletin dan majalah komunitas.



Sejak semester akhir sudah memantapkan diri bergabung dan melakukan riset sosial dan lingkungan. Di samping itu tetap menggeluti dunia tulis-menulis dengan menjadi kontributor lepas, dan memberikan jasa di bidang media, desain grafis dan publikasi.

Saat ini Jhoni menjadi editor di media online (kajanglako.com dan beritatanjabtim.com), sembari tetap mengikuti *passionnya* di bidang penelitian dengan menjadi tim pada beberapa riset sosial, politik dan lingkungan.

Tulisannya berupa artikel dan opini dimuat di media cetak dan online.

@jhoni_imron; jhonisucces@gmail.com